

Jurnal Penelitian

Vol.13, No.2, Desember 2016

OTONOMI DAERAH DAN PEMBANGUNAN PERDESAAN

- Respon Publik terhadap Model Penganggaran Partisipatif dalam Pembangunan Desa: Studi Tiga Provinsi di Indonesia
- Konteks Sosial Ekonomi Kemunculan Perempuan Kepala Daerah
- Desentralisasi dan Oligarki Predator di Wakatobi:
 Peran Oligarki dan Elit Penentu dalam Pembangunan Perdesaan
- Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa
- Otoda dalam UU Pemda Baru:
 Masalah dan Tantangan Hubungan Pusat dan Daerah

RESUME PENELITIAN

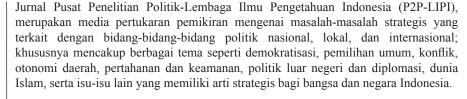
- Masa Depan Partai Islam di Indonesia
- Problematika Kekuatan Politik Islam di Maroko, Sudan, dan Somalia

REVIEW BUKU

Membangun Kemandirian Desa dalam Bingkai Otonomi Daerah

Jurnal Penelitian Politik	Vol. 13	No. 2	Him. 137-275	Jakarta, Desember 2016	ISSN 1829-8001
------------------------------	---------	-------	--------------	---------------------------	-------------------

Jurnal Penelitian Politik





P2P-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2P-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2P-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional

Mitra Bestari

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi)

Prof. Dr. Bahtiar Effendy (Ahli Kajian Politik Islam)

Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti (Ahli Kajian Pertahanan dan Hubungan Internasional)

Prof. Dr. Indria Samego (Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan)

Prof. Dr. Tirta Mursitama (Ahli Kajian Internasional)

Dr. C.P.F Luhulima (Ahli Kajian Ekonomi Politik Internasional, ASEAN, Eropa)

Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal)

Nico Harjanto, Ph.D (Ahli Kajian Perbandingan Politik)

Dr. Philips J. Vermonte (Ahli Kajian Pemilu dan Pemerintahan)

Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, MA (Ahli Politik Internasional, Migrasi, ASEAN) Dr. Ganewati Wuryandari, MA (Ahli Politik Luar Negeri dan Perbatasan)

Penanggung Jawab

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

Pemimpin Redaksi

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si

Dewan Redaksi

Adriana Elisabeth, Ph.D (Ahli Kajian Hubungan Internasional)
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam)
Firman Noor, Ph.D (Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian)
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian)
Drs. Heru Cahyono (Ahli Otonomi Daerah dan Desa)

Redaksi Pelaksana

Indriana Kartini, MA (Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik) Athiqah Nur Alami, MA (Ahli Kajian Hubungan Internasional) Dra. Awani Irewati, MA (Ahli Kajian Perbatasan, ASEAN dan Hubungan Internasional)

Sekretaris Redaksi

Esty Ekawati, S.Sos., M.IP Devi Darmawan, S.H Anggih Tangkas Wibowo, MMSi

Produksi dan Sirkulasi

Adiyatnika, A.Md Prayogo, S.Kom

Alamat Redaksi

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710 Telp/Faks. (021) 520 7118, E-mail: penerbitan.p2p@gmail.com Website: www.politik.lipi.go.id

ISSN 1829-8001

Jurnal Penelitian



Vol. 13, No. 2, Desember 2016

DAFTAR ISI

Daftar Isi Catatan Redaksi Artikel		i–ii iii–iv
•	Respon Publik terhadap Model Penganggaran Partisipatif dalam Pembangunan Desa: Studi Tiga Provinsi di Indonesia	
•	Kadek Dwita Apriani dan Irhamna Irham Konteks Sosial Ekonomi Kemunculan Perempuan	137–148
	Kepala Daerah Kurniawati Hastuti Dewi dan Ahmad Helmy Fuady	149–166
•	Desentralisasi dan Oligarki Predator di Wakatobi: Peran Oligarki dan Elit Penentu dalam Pembangunan Perdesaan	
•	Eka Suaib, La Husen Zuada, Waode Syifatu Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa	167–191
•	Nyimas Latifah Letty Azizi Otoda dalam UU Pemda Baru:	193–211
	Masalah dan Tantangan Hubungan Pusat dan Daerah R. Siti Zuhro	213–225
Resume Penelitian		
•	Masa Depan Partai Islam di Indonesia Moch. Nurhasim, dkk Problematika Kekuatan Politik Islam di Maroko,	227–244
	Sudan, dan Somalia Nostalgiawan Wahyudhi, dkk	245–260
Review Buku	Membangun Kemandirian Desa dalam Bingkai	
	Otonomi Daerah Yusuf Maulana	261–268
Tentang Penulis Pedoman Penulisan		269–270 271–275

CATATAN REDAKSI

Reformasi tahun 1998 membawa dampak pada pelaksanaan Otonomi di sejumlah daerah di Indonesia. Dengan menjalankan pemerintahan secara otonom, diharapkan daerah mampu menjalankan pembangunan demi kesejahteraan masyarakatnya. Akan tetapi, masih terdapat sejumlah persoalan yang ditimbulkan selama Otonomi daerah dilaksanakan di Indonesia, baik dari segi regulasi maupun implementasi dan pengawasannya. Sehingga, harapan dengan adanya otonomi daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, namun justru sebaliknya, banyak daerah tidak mampu membawa daerah kepada kesejahteraan, dan bahkan terjebak pada pragmatism politik akibat efek Pilkada Langsung yang diterapkan sejak tahun 2005.

Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan lima artikel yang membahas topiktopik yang terkait dengan Otonomi Daerah, Desentralisasi, pembangunan desa dan konteks sosial ekonomi yang memunculkan perempuan kepala daerah. Artikel pertama ditulis oleh Kadek Dwita Apriani dan Irhamna tentang "Respon Publik Terhadap Model Penganggaran Partisipatif dalam Pembangunan Desa: Studi Tiga Provinsi di Indonesia" mengurai tentang model penganggaran partisipatif dalam pembangunan desa merujuk pada program Dana Desa. Tujuan dari penelitian ini, untuk menggambarkan dan memetakan respon publik Indonesia mengenai program Dana Desa di wilayah Indonesia Barat yang diwakili oleh provinsi Banten; wilayah Indonesia Tengah yang diwakili Gorontalo; dan Indonesia Timur oleh Papua Barat.

Artikel kedua dengan judul Konteks Sosial Ekonomi: Kemunculan Perempuan Kepala Daerah yang ditulis oleh Kurniawati Hastuti Dewi dan Ahmad Helmy Fuady melihat kemungkinan kondisi sosial ekonomi memfasilitasi kemunculan dan kemenangan para perempuan kepala daerah, khususnya pada Pilkada langsung Desember 2015. Tulisan ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan

Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan, tidak memiliki korelasi kuat dengan jumlah perempuan kandidat kepala daerah, maupun jumlah perempuan yang terpilih.

Artikel berikutnya, "Desentralisasi dan Oligarki Predator di Wakatobi" tulisan La Husen Zuada dkk membahas mengenai praktek oligarki di Wakatobi. Di era otonomi daerah, para elit politik dan pengusaha adalah pemilik perusahan sektor pariwisata terbesar di Wakatobi dan juga berperan sebagai kelompok yang mengerjakan proyek pemerintah dan pada akhirnya bertransformasi menjadi oligarki predator yang melibatkan diri dalam pertahanan dan peningkatan kekayaan melalui sejumlah bisnis yang mereka kelola. Kehadiran oligarki di Wakatobi menumbuhkan gairah usaha baru, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan jumlah wisatawan. Namun pada sisi yang lain, kehadiran oligarki memunculkan ketimpangan pendapatan, konflik lahan serta perburuhan antara pemerintah, pengusaha dan warga di Wakatobi.

Artikel keempat yang ditulis oleh Nyimas Latifah Letty Azis tentang "Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa" menguraikan tentang persoalan alokasi pemberian dana desa dengan proporsi 90:10. Tujuan pemberian dana desa ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, dalam pelaksanaan penggunaan dana desa masih dirasakan belum efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana desa.

Adapun tulisan R. Siti Zuhro yang berjudul "Otoda dalam UU Pemda Baru: Masalah dan Tantangan Hubungan Pusat dan Daerah" menggambarkan permasalahan yang terjadi dalam era Otonomi Daerah. Permasalahan serius ketidakharmonisan hubungan pusat dan daerah tak cukup dijawab melalui perbaikan UU Pemda, tapi lebih penting dari itu adalah adanya political will dan political commitment dari para stakeholders otoda untuk konsisten

menjalankan amanah UU Pemda, khususnya pasal tentang binwas dan penguatan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Pemerintah pusat harus konsisten dalam menjalankan peraturan. Sebaliknya, pemerintah daerah tak perlu resisten berlebihan dalam merespons kebijakan pusat yang dianggap merugikan. Karena itu, penting bagi masing-masing pihak untuk memperbaiki pola komunikasi, sinergi dan koordinasi agar tercipta relasi pusat-daerah yang harmonis.

Tinjauan buku yang ditulis oleh Yusuf Maulana yang berjudul "Membangun Kemandirian Desa dalam Bingkai Otonomi Daerah" membahas mengenai persoalan pelaksanaan desentralisasi di tingkat desa yang belum jelas, yang terkait posisi desa dan dampak desentralisasi yang diharapkan. Adanya masalah struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa yang belum sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya. Kemudian masalah perubahan struktur dan fungsi tersebut belum memberikan kontribusi kepada kemandirian desa. Bagaimana perubahan tersebut bisa membuat potensi kemandirian desa bisa terbangun.

Selain lima artikel dan satu tinjauan buku diatas, nomor ini juga menghadirkan dua ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI. Artikel pertama, yang ditulis oleh Moch. Nurhasim berjudul "Masa Depan Partai Islam di Indonesia" menggambarkan peluang ideologi Islam dan partai-partai Islam di masa depan bergantung pada sejauhmana ideologi Islam dapat dihadirkan untuk menjawab persoalan ke-Indonesiaan dan kebangsaan. Peluang partai-partai Islam pada satu sisi dapat dilihat dari hasil elektoral, namun pada sisi yang jauh lebih mendasar dari hal itu ialah bagaimana meningkatakn kualitas kehadiran dan kontribusi partai-partai Islam bagi praktik demokrasi Indonesia yang tidak sekedar lebih etis dan beradab, melainkan juga lebih adil, akuntabel, dan berintegritas.

Artikel kedua ditulis oleh Nostalgiawan Wahyudi yang berjudul "Problematika Kekuatan Politik Islam di Maroko, Sudan dan Somalia" yang menguraikan fenomena "backward bending process" dimana gejolak politik dan regime change dibeberapa negara Timur Tengah tidak mengarah pada demokrasi, namun terjadi pembalikan kembali ke arah autoritarianisme. Maroko. Sudan dan Somalia memiliki keunikan dimana Ikhwanul Muslimin (IM) menjadi benang merah di ketiga negara tersebut. Meskipun begitu, gerakan IM lebih mengakar di Sudan dibandingkan dua negara lainnya karena faktor geografis dan historis. Selain itu, gerakan politik Islam di tiga negara ini muncul sebagai gerakan oposisi pro demokrasi menentang rezim otoriter.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya Jurnal Penelitian Politik nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi dan kajian mengenai Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Pembangunan Perdesaan di Indonesia. Selamat membaca.

Redaksi

Jurnal Penelitian



Vol. 13, No. 2, Desember 2016

DDC: 303:324.998

Kadek Dwita Apriani dan Irhamna

RESPON PUBLIK TERHADAP MODEL PENGANGGARAN PARTISIPATIF DALAM PEMBANGUNAN DESA: STUDI TIGA PROVINSI DI INDONESIA

Jurnal Penelitian Politik Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 137-148

Model penganggaran partisipatif dalam pembangunan desa merujuk pada program Dana Desa. Dua tahun berjalan, wacana tentang program ini lebih banyak berkaitan dengan hal teknis seperti perbedaan data jumlah desa; rekrutmen pendamping desa; atau syarat pencairan dana desa. Oleh sebab itu program ini dinilai kurang mendapat respon dari publik dalam arti luas sehingga berdampak pada partisipasi masyarakat dalam program yang dirancang dengan azas partisipasi dan pemberdayaan ini. Tujuan dari penelitian ini, untuk menggambarkan dan memetakan respon publik Indonesia mengenai program Dana Desa di wilayah Indonesia Barat yang diwakili oleh provinsi Banten; wilayah Indonesia Tengah yang diwakili Gorontalo; dan Indonesia Timur oleh Papua Barat. Berkaitan dengan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan tipe deskriptif. Sampel yang diambil di masingmasing provinsi berjumlah 800, sehingga MoEnya di kisaran 3%. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa lebih dari 50% responden tidak mengetahui tentang program Dana Desa, sehingga jumlah mereka yang berpartisipasi dalam program tersebut juga lebih rendah. Dari mereka yang mengetahui perihal program Dana Desa tersebut, hanya sekitar 53% yang menilai bahwa pemanfaatan Dana Desa di lingkungan tempat tinggalnya tepat sasaran. Pengetahuan dan penilian masyarakat di tiga wilayah Indonesia tentang program dana desa tersebut berkaitan dengan budaya masyarakatnya yang tercermin dalam indikator intensitas mengikuti rembug warga untuk menyelesaikan persoalan di lingkungan tempat tinggalnya. Makin tinggi intensitas mereka mengikuti rembug warga, maka makin besar kecenderungan responden untuk mengetahui perihal Dana Desa dan memberi penilaian positif terkait ketepatan pemanfaatan Dana Desa di lingkungan sekitarnya.

Kata kunci: dana desa, anggaran partisipatif, respon publik

DDC: 303:324.998

Kurniawati Hastuti Dewi dan Ahmad Helmy Fuady

KONTEKS SOSIAL EKONOMI KEMUNCULAN PEREMPUAN KEPALA DAERAH

Jurnal Penelitian Politik Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 149-166

Tulisan ini bertujuan melihat kemungkinan kondisi sosial ekonomi memfasilitasi kemunculan dan kemenangan para perempuan kepala daerah, khususnya pada Pilkada langsung Desember 2015. Tulisan ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan, tidak memiliki korelasi kuat dengan jumlah perempuan kandidat kepala daerah, maupun jumlah perempuan yang terpilih. Tulisan ini menemukan bahwa jumlah perempuan kandidat

kepala daerah maupun jumlah perempuan terpilih terkonsentrasi di daerah yang memiliki jumlah universitas yang banyak dan rata-rata tingkat akses internet yang tinggi seperti di Jawa. Oleh karena itu, tulisan ini menggarisbawahi dua hal: *pertama*, perempuan kepala daerah dapat muncul dalam kondisi sosial ekonomi apapun; *kedua*, persebaran berbagai gagasan baru dan informasi melalui universitas dan media internet menjadi kunci peningkatan jumlah perempuan kepala daerah.

Kata Kunci: sosial ekonomi, universitas, internet, perempuan kepala daerah.

DDC: 351.17

Eka Suaib, La Husen Zuada, Waode Syifatu

DESENTRALISASI DAN OLIGARKI PREDATOR DI WAKATOBI: PERAN OLIGARKI DAN ELIT PENENTU DALAM PEMBANGUNAN PERDESAAN

Jurnal Penelitian Politik Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 167-191

Artikel ini menguraikan tentang praktek oligarki di Wakatobi. Keunggulan pariwisata yang dimiliki Wakatobi menjadikan daerah ini sebagai lahan bisnis paling menjajikan. Potensi ini menjadi incaran para pengusaha, tidak terkecuali para elit politik. Di era otonomi daerah, para elit politik dan pengusaha adalah pemilik perusahan sektor pariwisata terbesar di Wakatobi dan juga berperan sebagai kelompok yang mengerjakan proyek pemerintah. Di era otonomi daerah, elit politik dan elit ekonomi di Wakatobi merupakan elit penentu, diantara mereka bertransformasi menjadi oligarki predator yang melibatkan diri dalam pertahanan dan peningkatan kekayaan melalui sejumlah bisnis yang mereka kelola. Kehadiran oligarki di Wakatobi menumbuhkan gairah usaha baru, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan jumlah wisatawan. Namun pada sisi yang lain, kehadiran oligarki memunculkan ketimpangan pendapatan, konflik lahan serta perburuhan antara pemerintah, pengusaha dan warga di Wakatobi.

Kata Kunci: Desentralisasi, Oligarki Predator, Elite Penentu, Pembangunan Perdesaan, Wakatobi

DDC: 352.4

Nyimas Latifah Letty Aziz

OTONOMI DESA DAN EFEKTIVITAS DANA DESA

Jurnal Penelitian Politik Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 193-211

Lahirnya UU No.6/2014 tentang desa telah membuka peluang bagi desa untuk meniadi mandiri dan otonom. Otonomi desa yang dimaksud adalah otonomi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Salah satu program yang diberikan pemerintah saat ini adalah pemberian dana desa dengan proporsi 90:10. Tujuan pemberian dana desa ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, dalam pelaksanaan penggunaan dana desa masih dirasakan belum dikarenakan belum efektif memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: otonomi desa, efektivitas, dana desa

DDC: 352.14 R. Siti Zuhro

OTODA DALAM UU PEMDA BARU: MASALAH DAN TANTANGAN HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH

Jurnal Penelitian Politik Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 213-225

Setelah 16 tahun menerapkan desentralisasi dan otonomi daerah, hasil tidak menggembirakan, terutama dalam kaitannya dengan tata pemerintahan yang baik lokal, daya saing ekonomi lokal, kualitas pelayanan

publik dan kesejahteraan masyarakat setempat. Meskipun pemerintah daerah di beberapa daerah telah terbukti mampu inovasi dalam memberikan pelayanan publik, jumlahnya masih minim dibandingkan dengan jumlah daerah mengalami stagnasi dalam perkembangan mereka. Ada sekitar 122 kabupaten masih dikategorikan sebagai berkembang. Hukum 23/2014, menggantikan hukum 34/2004 tentang pemerintah daerah, adalah hukum mengikat daerah dan secara signifikan lebih menuntut kinerja. Meskipun masih dipertanyakan, hukum ini diharapkan dapat memberikan dasar yang lebih baik untuk sinergi dan kerjasama antar daerah, meningkatkan hubungan antara pusat dan daerah, mempromosikan inovasi dalam pelayanan publik dan membangun kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: desentralisasi, otonomi daerah, pemerintah daerah, pelayanan publik.

DDC: 324.23 Moch. Nurhasim

MASA DEPAN PARTAI ISLAM DI INDONESIA

Jurnal Penelitian Politik Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 227-244

Keberadaan partai politik Islam bukan sekedar penanda tumbuh suburnya pluralitas politi di Tanah Air, namun jauh dari itu, pluralitas ke-Indonesiaan tidak ada artinya tanpa ke-Islama di dalamnya. Oleh karena iu, partaipartai Islam tetap relevan dan dibutuhkan, bukan hanya sebagai saluran aspirasi dan kepentingan umat Islam, malainkan juga sebagai bagian dari pluralitas dan ke-Indonesiaan itu sendiri. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa peluang ideologi Islam dan partai-partai Islam di masa depan bergantung pada sejauhmana ideologi Islam dapat dihadirkan untuk menjawab persoalan ke-Indonesiaan dan kebangsaan. Peluang partai-partai Islam pada satu sisi dapat dilihat dari hasil elektoral, namun pada sisi yang jauh lebih mendasar dari hal itu ialah bagaimana meningkatakn kualitas kehadiran dan kontribusi partai-partai Islam bagi praktik demokrasi Indonesia yang tidak sekedar lebih etis dan beradab, melainkan juga lebih adil, akuntabel, dan berintegritas.

Kata Kunci: Partai Politik, Partai Islam, Demokrasi, Pemilu

DDC: 320.962.4

Nostalgiawan Wahyudhi

PROBLEMATIKA KEKUATAN POLITIK ISLAM DI MAROKO, SUDAN, DAN SOMALIA

Jurnal Penelitian Politik Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 245-260

Riset ini diformulasikan untuk meneliti perkembangan kekuatan politik Islam di Maroko, Sudan dan Somalia paska Arab spring. Berdasarkan riset tahun 2014, kami menemukan fenomena "backward bending process" dimana gejolak politik dan regime change dibeberapa negara kasus sebelumnya justru tidak mengarah pada demokrasi, namun terjadi pembalikan kembali ke arah autoritarianisme. Maroko, Sudan dan Somalia memiliki keunikan dibanding penelitian sebelumnya, dimana Ikhwanul Muslimin (IM) menjadi benang merah di ketiga negara tersebut. Meskipun begitu, gerakan IM lebih mengakar di Sudan dibandingkan dua negara lainnya karena faktor geografis dan historis. Selain itu, gerakan politik Islam di tiga negara ini muncul sebagai gerakan oposisi pro demokrasi menentang rezim otoriter. Penelitian ini membuktikan fenomena Arab exceptionalism terjadi. Budaya dan sistem politik di tiga negara kasus tidak memberikan ruang yang cukup bagi tumbuhnya iklim demokrasi.

Kata kunci: Politik Islam, Arab spring, Demokrasi

DDC: 307.72 Yusuf Maulana

MEMBANGUN KEMANDIRIAN DESA DALAM BINGKAI OTONOMI DAERAH

Jurnal Penelitian Politik Vol. 13 No. 2, Desember 2016, Hal. 261-268

Persoalan yang melingkupi desa cukup kompleks. Terutama persoalan pelaksanaan desentralisasi di tingkat desa yang belum jelas, yang terkait posisi desa dan dampak desentralisasi yang diharapkan. Adanya masalah struktur dan fungsi kelembagaan pemerintahan desa yang belum sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya. Kemudian masalah perubahan struktur dan fungsi tersebut belum memberikan kontribusi kepada kemandirian desa. Bagaimana perubahan tersebut bisa membuat potensi kemandirian desa bisa terbangun

Kata Kunci: Desa, Desentralisasi, Otonomi Daerah, Kelembagaan.

Jurnal Penelitian



Vol. 13, No. 2, Desember 2016

DDC: 352.14

Kadek Dwita Apriani dan Irhamna

PUBLIC RESPONSES TOWARDS
PARTICIPATORY BUDGETING MODEL
IN VILLAGE DEVELOPMENT: CASE
STUDIES IN THREE PROVINCES IN
INDONESIA

Journal of Political Research Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 137-148

Participatory budgeting in this article refer to village development through village fund. One of the nine development priorities by the Joko Widodo's Government. However, at their second year after implemented, the discourse of this program was merely related to techincal constraint such as the difference of villages number, the recruitment of village assistants, or how the fund being processed. Therefore, this program was not getting any significant responses from the public, which affected the level of public participation, even when empowerment and participation became the main principles. This research aims to describe public responses towards village fund in three provinces which represented three parts of Indonesia: Banten, Gorontalo, and West Papua. This research use descriptive-quantitative method. There are 800 samples that being taken from each province, with 3% MoE. This research finds that more than 50% of respondents did not have any information about the village fund, therefore the numbers of society who actively engaged in the program is low. There only 53% of respondents who agreed that the village fund was used correctly. Public's knowledge and judgement in three provinces are related to their culture which reflected from their intensity to be involved in public consultation or hearing. The higher their intensity to be involed, the greater

the respondents' tendency to be aware of village fund, and resulting a positive value about the pertinency of village fund.

Kata kunci: village fund, participatory budgeting, public responses

DDC: 303:324.998

Kurniawati Hastuti Dewi and Ahmad Helmy Fuady

SOCIO ECONOMIC CONTEXT OF INDONESIAN WOMEN PATH TO LOCAL POLITICS

Journal of Political Research Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 149-166

This paper aims to see possible pattern of socio-economic conditions that may contribute in facilitating the rise and victory of female leaders, particularly in the December 2015 local direct elections. This paper reveals that, human development index, poverty rate, and gini ratio of a region did not strongly correlate with the number of female leader candidates, nor with the number of the elected female leaders. This paper also shows that the number of candidate and elected female leaders is concentrated in areas which have large number of universities and high proportion of internet access, such as Java. This paper highlighted two important points: first, female leader candidates can emerge and be elected from various socioeconomic conditions of region; second, flows of ideas and information through universities and internet access are important keys to the rise and victory of female leaders in local politics.

Keywords: socio-economic condition, university, internet, female local leader.

DDC: 351.17

Eka Suaib, La Husen Zuada, Waode Syifatu

DECENTRALIZATION AND OLIGARCHY PREDATOR IN WAKATOBI: THE ROLE OF OLIGARCHY'S AND ELITE'S STRATEGIC IN RURAL DEVELOPMENT

Journal of Political Research Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 167-191

The present article discusess about the practice of oligarchy in Wakatobi. Wakatobi has attracted lots of tourist in recent past and tourism has become one of the major source of bussiness in this area. The tourism industry guarantees not only employment in the region but is also a major way to gain political power. In this era of Wakatobi the regional autonomy is controlled by political elites and entrepreneurs. It is these political elites and the enterprenuers who also control the tourism industry and are the owners of the largest tourist company. There is nexus between the politicians and the entreprenuers who takes away all the major gorvernment tourist projects. This group of politicians and enternprenuers, who are responsible for the development of the region, are also the people who control the maximum wealth of the region. Though the presence of oligarchy in Wakatobi has grown new businesses, created jobs and increased the number of tourists in the region, but it has also brought income inequality, land owners and labors conflicts and other problems among people of Wakatobi.

Keywords: Decentralization, Oligarchy Predator, Elite Strategic, Rural Development, Wakatobi.

DDC: 352.4

Nyimas Latifah Letty Aziz

VILLAGE AUTONOMY AND EFFECTIVENESS OF VILLAGE FUND

Journal of Political Research Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 193-211

The Law No.6 / 2014 on the village has opened up opportunities for villages to become self-sufficient and autonomous. Village autonomy is autonomous of village governments in managing the finances of the village. One program that given by the government is the village fund with the proportion of 90:10. The purpose of giving the village fund is to improve the welfare of rural communities. However, in the implementation of the use of village funds still felt not effective due to inadequate capacity and capability of the village government and not the involvement of active community participation in the management of village funds.

Keywords: village autonomy, effectiveness, village fund

DDC: 352.14 R. Siti Zuhro

LOCAL GOVERNMENT ACT OTODA IN NEW: ISSUES AND CHALLENGES AND LOCAL CONNECTION

Journal of Political Research Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 213-225

After 16 years implement decentralization and regional autonomy, the results is not encouraging, particularly in relation to good local governance, local economic competitiveness, the quality of public services and the welfare of local communities. Although local government in some regions have proven capable of innovation in providing public services, the numbers are still minimal compared to the number of regions experiencing stagnation in their development. There are approximately 122 districts are still categorized as undeveloped. Law 23/2014, replacing the 34/2004 law on regional government, is legal binding on regions and is significantly more demanding of performance. Although it is still questionable, this law is expected to provide a better basis for synergy and cooperation between regions, improved relations between center and regions, promoting innovation in public services and building social welfare.

Keywords: decentralization, local autonomy, local government, public services.

DDC: 324.23 Moch. Nurhasim

THE FUTURE OF ISLAMIC PARTIES IN INDONESIA

Journal of Political Research Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 227-244

The existence of an Islamic political party is not just a marker of the flourishing plurality polities in the country, but far from it, a plurality Indonesiaan nothing without all Islama in it. Therefore iu, Islamic parties remain relevant and needed, not only as a channel for the aspirations and interests of Muslims, malainkan also as part of plurality and Indonesiaan itself. The results of this study showed that the chances of Islamic ideology and Islamic parties in the future depends on how far the Islamic ideology can be presented to answer the question Indonesiaan and nationality. Opportunities of Islamic parties on the one hand can be seen from the results electoral, but in the much more basic than it is how meningkatakn quality presence and contribution of Islamic parties for the practice of democracy in Indonesia is not only more ethical and civilized, but also more fair, accountable, and integrity.

Keywords: Party, Islamic Party, Democracy, Election

DDC: 320.962.4

Nostalgiawan Wahyudhi

THE PROBLEMS OF THE POWER OF POLITICAL ISLAM IN MOROCCO, SUDAN AND SOMALIA

Journal of Political Research Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 245-260

This research is formulated to examine the development of political Islam in Morocco, Sudan and Somalia in post Arab spring. Based on research finding in 2014, we found the phenomenon of "backward bending process" in which the political unrest and regime change in previous case studies do not lead towards democracy, but turned back to authoritarianism. The research on Morocco, Sudan and Somalia shows a unique finding that the Muslim Brotherhood (IM) has existed in these three countries. However this movement is deeply rooted in Sudan compared to the rest countries based on geographical and historical reason. Other findings are Islamic political movements have emerged as democratic opposition movements against the authoritarian regimes. This study proves that the phenomenon of 'Arab exceptionalism' has existed. The cultural and political systems in these three countries do not provide a sufficient space for the growth of democracy.

Keywords: Political Islam, Arab Spring, Democracy

DDC: 307.72 Yusuf Maulana

INDEPENDENCE VILLAGE BUILDING IN FRAME OF REGIONAL AUTONOMY

Journal of Political Research Vol. 13 No. 2, December 2016, Page 261-268

Issues surrounding the village is complex. Especially the issue of decentralization in the village are not clear, which is related to the position of the village and the expected impact of decentralization. The existence of the problem structure and function of rural government institutions are not in accordance with the needs of the village and its people. Then the problem changes in the structure and the function has not contributed to the independence of the village. How these changes could create the potential independence of the village can be awakened.

Keywords: village, decentralization, autonomy, institutional.

RESUME PENELITIAN MASA DEPAN PARTAI ISLAM DI INDONESIA¹

RESEARCH SUMMARY THE FUTURE OF ISLAMIC POLITICAL PARTIES IN INDONESIA

Moch. Nurhasim, Syamsuddin Haris, Lili Romli, Sri Nuryanti, Luky Sandra Amalia, Devi Darmawan, Ridho Imawan Hanafi

Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10 Jakarta *E-mail*: hasim nur@yahoo.com; nurhasimlipi@gmail.com

Diterima: 27 Oktober 2016; direvisi: 8 November 2016; disetujui: 30 Desember 2016

Abstract

The existence of Islamic political party is not just a marker of the arising of plurality politics in this country. But, far beyond it, plurality "Keindonesiaan" means nothing without islam in the plurality itself. Therefore, Islamic political parties remain relevant and needed, not only as a channel for the aspirations and interests of Muslims, but also as part of plurality and "Keindonesiaan". This study results showed that chance of islamic ideology and Islamic political parties in the future depends on how far the Islamic ideology can be presented to answer the problems about "Keindonesiaan" and nationality. The opportunities of Islamic political parties could be figured out from electoral results. But, the more fundamental point is how to improve the quality of the presence and contribution of islamic political parties in practicing democracy more ethically, civilized, and also fair, accountable, and full of integrity.

Keywords: Democracy, Election, Islamic Political Party

Abstrak

Keberadaan partai politik Islam bukan sekedar penanda tumbuh suburnya pluralitas politik di Tanah Air. Namun jauh dari itu, pluralitas "Keindonesiaan" tidak ada artinya tanpa ke-Islam di dalamnya. Oleh karena itu, partai-partai Islam tetap relevan dan dibutuhkan, bukan hanya sebagai saluran aspirasi dan kepentingan umat Islam, melainkan juga sebagai bagian dari pluralitas dan "Keindonesiaan" itu sendiri. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa peluang ideologi Islam dan partai-partai Islam di masa depan bergantung pada sejauhmana ideologi Islam dapat dihadirkan untuk menjawab persoalan "Keindonesiaan" dan kebangsaan. Peluang partai-partai Islam pada satu sisi dapat dilihat dari hasil elektoral, namun pada sisi yang jauh lebih mendasar dari hal itu ialah bagaimana meningkatkan kualitas kehadiran dan kontribusi partai-partai Islam bagi praktik demokrasi Indonesia yang tidak sekedar lebih etis dan beradab, melainkan juga lebih adil, akuntabel, dan berintegritas.

Kata Kunci: Demokrasi, Partai Politik Islam, Pemilu

Pendahuluan

Naik-turunnya suara partai Islam dalam setiap pemilu menunjukkan tingkat instabilitas suara partai Islam relatif tinggi dibandingkan dengan non-agama. Padahal, pemilih di Indonesia sebagian besar adalah pemilih yang beragama Islam. Namun dalam politik nyata, sepertinya ada

¹ Moch. Nurhasim (Koordinator), Syamsuddin Haris, Lili Romli, Sri Nuryanti, Luky Sandra Amalia, Devi Darmawan, dan Ridho Imawan Hanafi.

paradoks elektoral—antara dukungan pemilih dengan ideologi yang diusung oleh partai. Secara sepintas tampak bahwa pemilih yang beragama Islam cenderung tidak lagi "tertarik" untuk mendukung partai-partai politik yang mengusung ideologi Islam atau partai-partai politik yang menggunakan simbol-simbol agama (Islam). Kecenderungan seperti itu sudah terjadi pada Pemilu 1955, dan semakin jelas pada pemilupemilu di era reformasi.

Kajian ini ingin menjawab tiga pertanyaan pokok penelitian berkaitan dengan naik-turunnya suara partai Islam pada pemilu era reformasi, yaitu: (1) Mengapa kecenderungan penurunan dukungan pemilih terhadap partai Islam dari pemilu ke pemilu di era reformasi terus terjadi? (2) Faktor-faktor apa yang memengaruhi volatilitas elektoral partai-partai Islam dari pemilu ke pemilu?; dan (3) Bagaimana masa depan partai politik Islam di Indonesia?

Partai Islam dan Volatilitas Pemilihan

Partai politik (parpol) adalah organisasi yang memiliki ideologi dan tujuan politik² yang diwujudkan dalam keikutsertaannya pada pemilihan umum (pemilu). Parpol juga dianggap sebagai sebuah organisasi yang memiliki hubungan dengan pemilih. Parpol merupakan agen perwakilan yang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, menuntut dukungan mereka, yang dipengaruhi secara langsung oleh perubahan suara dalam suatu proses pemilihan.³

Dalam arti fungsional, parpol merupakan alat utama dari representasi penduduk, yang berkompetisi dalam pemilu dan dipilih oleh pemilih berdasarkan tindakan dan kebijakan yang mereka tawarkan.⁴ Parpol dianggap sebagai aktor rasional yang bereaksi dan beradaptasi terhadap desakan dan kesempatan yang ada di pasar politik.⁵ Organisasi, ideologi, dan

keanggotaan serta kebijakan partai politik dipengaruhi oleh tipe pemerintahan, sistem pemilu, pengalaman demokrasi, ⁶ dan aturan pemilu⁷ yang dipraktikkan oleh suatu negara. Sebagai sebuah organisasi, parpol bersifat dinamis dan tidak statis, mengalami perubahan pada tingkat struktural dan institusional secara terus-menerus sebagai dampak dari perubahan lingkungan eksternalnya.

Partai Islam dalam riset ini merujuk pada dua pembatasan, pertama, sebuah partai yang menjadikan Islam sebagai asas atau ideologi secara jelas dan tegas seperti tercantum pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Kedua, adalah partai yang tidak mencantumkan Islam sebagai asas atau ideologi, tetapi identitas partai tidak dapat dipisahkan dari simbol-simbol Islam. Dari dua pembatasan tersebut, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah dua partai yang secara tegas menjadikan Islam sebagai asas atau ideologinya. Sedangkan yang termasuk pada kategori kedua adalah Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang tidak menjadikan Islam sebagai asas dan ideologi—ideologinya terbuka—tetapi Islam tidak dapat dilepaskan sebagai bagian dari identitas dan simbol-simbol kepartaiannya. Juga sejarah pendiriannya yang tidak dapat dilepaskan dari komunitas Islam, baik secara ideologi, kultural, dan simbol-simbol keagamaan.

Volatilitas pemilihan (*electoral volatility*) adalah turun naiknya perolehan suara partai politik dari pemilu ke pemilu atau stabil-tidaknya perolehan suara parpol dari pemilu ke pemilu. Dalam studi tentang pemilu, volatilitas elektoral menjadi salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan perolehan suara partai pada dua pemilu secara berturut-turut.

² K.R. Luther and F Müller-Rommel, "Political Parties in a Changing Europe", dalam K.R. Luther and F. Müller-Rommel, eds. *Political Parties in the New Europe*, (Oxford: Oxford University Press, 2002), hlm. 3–16.

³ Sergiu Gherghina, *Party Organization and Electoral Volatility in Central and Eastern Europe Enhancing Voter Loyalty*, (Oxon: Routledge, 2015), hlm. 21.

⁴ Ibid.

⁵O. Kirchheimer, "The Transformation of the Western European

Party System", dalam J. LaPalombara and M. Weiner, eds., *Political Parties and Political Development*, (Princeton NJ: Princeton University Press, 1966), hlm. 177–200.

⁶ D.W. Rae, *The Political Consequences of Electoral Laws*, (New Haven, CT: Yale University Press, 1971). Lihat juga, R. Harmel dan K. Janda, *Parties and Their Environments: Limits to Reform*, (New York: Longman, 1982).

⁷ G. Sartori, *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1976). G. Sartori, *Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry into Structures, Incentives and Outcomes*, 2nd ed., (Basingstoke, UK: Macmillan, 1997).

Secara matematik, rumus yang biasa digunakan adalah Indeks Pedersen. Indeks ini memang tidak dapat mengungkap alasan-alasan perpindahan suara pemilih secara individual dari satu partai ke partai lain dalam sebuah pemilu, namun indeks Pedersen minimal dapat mengungkap tingkat konsolidasi atau pelembagaan sistem kepartaian, stabilitas, stagnasi dan fluktuasi suara partai pada dua pemilu secara berturut-turut. Pedersen mengartikan *electoral volatility* sebagai "by which will be meant the net change within the electoral party system resulting from individual vote transfers." Rumus yang dikembangkan adalah: $p_{i,t-1}$ adalah sebuah persentase yang diperoleh oleh suatu partai pada pemilu (i) dan pada pemilu sebelumhya (t-1), sehingga dihasilkan rumus sebagai berikut:8

$$\begin{split} \mathcal{E}p_{i,t} = p_{i,t} - p_{i,t-1} \\ \text{Total Net Change (TNC}_{t}) &= \sum_{i=1}^{n} |\Delta p_{i,t}| \\ 0 &\leq \text{TNC}_{t} \leq 200 \\ \text{Volatility } (V_{t}) = 1/2 \times \text{TNC}_{t} \\ 0 &\leq V_{t} \leq 100 \end{split}$$

Sebagai contoh, dalam pemilu pertama, Parpol A meraup suara 65 %, Parpol B 25% dan Parpol C 10%. Kemudian, dalam pemilu kedua, perolehan suara parpol A tetap 65%, Parpol B turun menjadi 10% dan Parpol C naik menjadi 20%. Maka volatilitas partai dapat ditentukan sebagai berikut:

Tabel 1. Contoh Menghitung Volatilitas Partai dari Satu Pemilu ke Pemilu⁹

Pemilu/Partai	A	В	С
Pemilu Pertama	65%	25%	10%
Pemilu Kedua	65%	15%	20%
Selisih	0	-10%	10%
Selisih Mutlak	0	10%	10%

Volatilitas (v) = $\frac{1}{2}$ (0% + 10% + 10%) = 20/2 = 10%

Dari contoh di atas terlihat bahwa penguapan suara Partai A tidak terjadi, karena mendekati 0 persen, sedangkan Partai B kebalikannya, kehilangan 10 persen, dan Partai C mengalami peningkatan 10 persen. Dengan rumus itu akan diperoleh rata-rata volatilitas pemilu pada suatu negara. Dengan rumus ini tidak dapat menjelaskan mengapa terjadi penguapan suara dan kenaikan suara pada suatu partai. Rumus di atas hanya dapat memberikan gambaran awal volatilitas partai yang terjadi. Angka-angka tersebut tidak dapat menunjukkan mengapa terjadi kenaikan dan penurunan pada suatu partai dari pemilu ke pemilu. Oleh karena itu, diperlukan konsep volatilitas elektoral yang secara kualitatif dapat menjelaskan turun naiknya suara partai politik dari satu pemilu ke pemilu lainnya.

Penjelasan kualitatif juga dapat menggambarkan masa depan partai, dilihat dari stabilitas perolehan suara dari pemilu ke pemilu dan stabilitas suara partai pada sistem kepartaian serta sistem pemilu berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sementara untuk mengukur tingkat volatilitas partai secara tunggal—dapat menggunakan model volatilitas yang dikembangkan oleh Mainwairing, di mana volatilitas pemilihan partai dihitung dengan menambahkan perubahan persentase (bertambah atau berkurang) dari setiap pemilu, kemudian dibagi menjadi dua. 10 Konsep ini dapat digunakan untuk menjelaskan eksistensi partai pada sistem kepartaian dan pemilu berdasarkan perolehan suara partai tersebut, apakah tergolong sebagai partai papan atas, menengah, atau bawah.

Menurut Shergiue Ghergina, elektoral pemilihan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang memiliki tingkat dominan yang berbeda-beda. Sejumlah faktor tersebut berkaitan dengan bekerjanya faktor internal dan eksternal partai sebagaimana tampak pada tabel di bawah. Dalam konteks Indonesia, perlu ada modifikasi dan penambahan, sebab teori yang dibangun oleh Ghergina lebih digunakan dalam melihat perkembangan elektoral partai-partai politik di Eropa Barat dan Tengah.

⁸ Mengenai rumus ini dapat dilihat pada Mogens N. Pedersen, Excerpted from 'The Dynamics of European Party Systems: Changing Patterns of Electoral Volatility', European Journal of Political Research, 7/1 (1979), 1-26. Copyright 1979. Reprinted with permission of Kluwer Academic Publishers.

⁹ Pipit R. Kartawidjaj dan M. Faishal Aminuddin, *Demokrasi Elektoral (Bagian I) Perbandingan Sistem dan Metode dalam Kepartaian dan Pemilu*, (Surabaya: Sindikasi Indonesia, 2014), hlm. 37.

¹⁰ Scott Mainwaring, "Rethingking Party System Theory In The Third Wave of Democratization: The Importance of Party System Institutionlization, Working Paper #260 – October 1998, Kellogg Institute, hlm. 9.

Tabel 2. Modifikasi Faktor-faktor yang Memengaruhi Elektoral Pemilihan Partai Politik¹¹

Faktor	Variabel		Indikator
Internal	Organisasi	1.	Loyalitas
Partai	Partai	2.	Akar Sosial
		3.	Perpecahan
			atau kohesi
		4.	Kinerja
			elektoral partai
			(jaringan
			sosial, interaksi
			antara partai
			dengan
			pemilih,
			kedekatan/
			jarak aktor/
			kader partai
			dengan
			pemilih).
Eksternal	Volitilitas	1.	Sistem pemilu
Partai	Sistem	2.	Format partai
	Kepartaian		politik
	- F	3.	Polarisasi
			ideologi

Secara umum, volatilitas elektoral partai dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal sebenarnya berkaitan dengan organisasi partai politik dan faktor eksternal berkaitan dengan volatilitas sistem kepartaian. Ghergina menyebutkan bahwa organisasi partai dapat mengurangi atau menambah volatilitas partai pada pemilu. Studi yang dilakukan oleh Barelson et all 1954; Easton 1957 membahas sejauhmana partai politik dapat menyederhanakan pilihan-pilihannya sehingga menghasilkan simbol identitas dan loyalitas.

Sementara, Neumann 1956; Key 1964; Borre dan Katz 1973; Rosenstone dan Hansen 1993; Dalton dan Wattenberg 2000a) menyebut ada kesinambungan partai politik dalam pemilu, apabila partai-partai dapat menciptakan sebuah rantai komunikasi dengan warga. Dalam konteks itu, stabilitas organisasi partai politik akan memelihara preferensi pemilihan. Partai yang memiliki stabilitas organisasi akan hadir secara terus menerus pada arena politik dan mereka secara jangka panjang dapat memperkenalkan perspektif preferensinya kepada pemilih melalui

pengenalan label organisasi dan kandidatkandidat yang disiapkan.¹²

Simbol identitas dan loyalitas berkaitan dengan apa yang akan dijual oleh partai-partai politik kepada pemilih. Banyak faktor yang berkaitan dengan hal itu, antara lain bagaimana faktor pembelahan sosial dalam kaitannya dengan preferensi pemilih dalam konteks sosial-politik pada suatu negara. Teori pembelahan sosial dari Lipset menyebut bahwa dalam sistem kepartaian, pemilih mengidentifikasi kepentingan mereka atas dasar posisi sosiologi masyarakat atas dasar kelas, agama, etnik, kebangsaan, dan kota/desa. Pembentukan partai politik juga didasari oleh preferensi mereka atas posisi sosial tersebut (kelas, agama, etnik atau kembangsaan dan sektor kota/pedesaan).¹³

Perbedaan ideologi antara satu partai dengan partai lainnya menurut hasil kajian Kuskridho Ambardi dipengaruhi oleh sistem kepartaian. Sistem kepartaian di Indonesia dalam pandangan Ambardi dicirikan oleh beberapa hal. ¹⁴ Pertama, ideologi tidak menjadi faktor penting yang menentukan perilaku partai. Kedua, dalam pembentukan koalisi, tidak ada rambu-rambu yang memandu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh; semua serba boleh (promicious). Ketiga, kecenderungan untuk merangkul semua partai ke dalam koalisi (koalisi turah) membuat keberadaan oposisi sulit diidentifikasi. Keempat, perilaku partai tidak ditentukan oleh hasil menang-kalah dalam pemilu (inkonsekuensial). *Kelima*, terlepas dari perbedaan identitas normatif yang "dijual" dalam kampanye pemilu, partai-partai cenderung bertindak sebagai satu kelompok.

Kekaburan identitas antarpartai dan "kekaburan" ideologi seperti disebut oleh Ambardi, menyebabkan tidak adanya polarisasi ideologi yang tajam antara satu partai dengan

¹¹ Gherghina, "Party Organization and Electoral Volatility...", hlm. 16-33.

¹² Gherghina, "Party Organization and Electoral Volatility...", hlm. 6.

¹³ Scott Mainwaring and Mariano Torcal, "Party System Institutionalization and Party System Theory After the Third Wave of Democratization," dalam *Working Papar* #319-April 2005, Kellogg Institute (The Helen Kellogg Institute for International Studies), hlm. 12.

¹⁴ Peter Mair, *Party System Change, Approaches and Interpretations*, (New York: Oxford University Press, 2002), hlm. 28-29.

partai lainnya. Perbedaan di antara partai-partai Islam sendiri dan antara satu partai Islam dengan partai nasionalis misalnya, turut menentukan preferensi politik pemilih kepada partai yang bersangkutan. Hal ini juga didorong oleh adanya suatu kenyataan bahwa dalam perkembangan politik di Indonesia, partai-partai sengaja mengaburkan jenis kelamin ideologi mereka, karena mereka meyakini bahwa proporsi pemilih dalam garis pembelahan ideologi/budaya lebih berdiam di tengah (bukan ekstrem kiri maupun kanan). Pada titik inilah, mobilisasi finansial untuk memenangkan persaingan elektoral melalui iklan dan money politics lebih ditempuh partai-partai ketimbang mengedepankan tawaran ideologi dan program untuk mendekati pemilih.¹⁵ Kecenderungan seperti itu sudah pernah diprediksi oleh Pedersen (1979) bahwa volitilitas pemilu setelah 1960 lebih berakar pada jarak sosial partai dengan pemilihnya. Artinya, perubahan preferensi pemilihan telah mengubah secara longitudinal dan menyebabkan transformasi pada nilai-nilai struktur sosial.¹⁶

Dalam kaitan itu, kinerja elektoral partai politik menjadi penting. Kinerja elektoral mencakup sejumlah langkah atau cara yang digunakan oleh partai-partai politik untuk memaksimalkan jaringan yang dimiliki, membuat branding bagi partai politiknya, dan bagaimana partai politik melakukan interaksi dengan para pemilihnya. Seperti telah disinggung oleh Gherghina di atas bahwa stabilitas partai—kohesi internal partai—di mana partai tidak mengalami perpecahan (cleavage) yang memungkinkan partai memiliki kinerja elektoral yang lebih terfokus pada pemilu dan agenda pemenangan pemilu.

Dalam kaitan itu, studi yang dilakukan oleh Tilly dalam mengkaji pertumbuhan partai-partai politik di Amerika Latin menyebut bahwa eksis atau tidaknya partai politik dipengaruhi oleh tiga indikator utama. ¹⁷ Ketiga indikator itu adalah tingkat institusionalisasi (*institutionalization*), volatilitas pemilihan (*electoral volatility*), dan pilihan ideologi (*ideological voting*).

Studi itu menyebut bahwa sistem kepartaian di negara-negara yang belum berkembang menunjukkan polarisasi pelembagaan yang disebut tidak stabil, tidak memiliki akar rumput yang kuat, dan legitimasi yang disesuaikan oleh aktor-aktor politik partai. 18 Pada konteks pilihan ideologi (ideological voting), berbagai literatur perilaku memilih menggambarkan bahwa kompetisi antarpartai lebih didominasi oleh dua asumsi yakni berbasis program (programmatic) atau ideologi/keyakinan pemilih (ideological voters). Pada negara-negara yang belum maju demokrasinya, umumnya faktor personalisasi begitu besar dan menonjol. Perilaku pemilih lebih didasari pada pengaruh personal atau figur dalam menentukan pilihan-pilihannya.¹⁹

Sementara partai yang mengarah moderen, pengaruh figur atau orang makin mengecil dan institusi partai (kelembagaan dan pelembagaan partai) menjadi lebih kuat. Dalam konteks kelembagaan dan pelembagaan partai, pengaruh kepemimpinan pada organisasi partai juga turut menentukan. Apakah partai mengembangkan kepemimpinan yang sifatnya personal dengan ciri loyalitas yang bersandar pada orang ataukah kepemimpinan partai lebih didasarkan pada prinsip-prinsip organisasi yang modern, di mana seorang pemimpin adalah manajer yang akan membawa roda organisasi sesuai dengan AD/ART. Sumber daya untuk mengisi kepemimpinan partai juga tersedia dari pusat hingga daerah. Dalam hal itu, seorang pemimpin perannya memang penting, tetapi tidak membayangi partai dan loyalitas lebih didasarkan pada institusi dan bukan personal.

Selain sejumlah faktor yang telah disebut di atas, khususnya faktor internal dan eksternal, faktor lain yang juga memiliki pengaruh pada masa depan suatu partai politik adalah sistem pemilu dan demokratisasi. Michael Gallagher dan

¹⁵ Burhanuddin Muhtadi, Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan pengajar FISIP UIN Jakarta, "Pro-Kontra Penyederhanaan Sistem Kepartaian", dalam http://www. lampungpost.com/opini/20730-pro-kontra-penyederhanaansistem-kepartaian.html, 5 Januari 2012.

¹⁶ Gherghina, "Party Organization and Electoral Volatility...," hlm. 15.

¹⁷ Scott Mainwaring dan Timothy R Scully, *Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America*, (Stanford, California: Stanford University Press, 1995), hlm. 5.

¹⁸ Mainwaring, "Party System Institutionalization...", hlm. 4-14.

¹⁹ Mainwaring, "Party System Institutionalization...", hlm. 18-19.

Paul Mitchell menyebut bahwa sistem pemilu membuat perbedaan yang besar atas bentuk sistem kepartaian, bentuk pemerintahan (apakah koalisi atau partai tunggal).²⁰

Disamping itu, berbagai macam pilihan dalam menghadapi pemilih dalam pemilu, kemampuan pemilih untuk pertahankan akuntabilitas keterwakilan personal mereka, perilaku angota parlemen, seberapa banyak parlemen berisi orang-orang yang cakap, seberapa jauh demokrasi dan kohesi di dalam partai politik, kualitas pemerintahan dan tentu saja kualitas hidup masyarakat yang diatur oleh pemerintahan tersebut.²¹

Pengaruh sistem pemilu pada demokratisasi dan kohesi di dalam partai politik salah satunya ditentukan apakah sistem kepartaian dan pemilu dapat mendorong proses-proses yang demokratis dalam mengatur pelbagai kepentingan dalam proses pencalonan, penempatan, dan rekrutmen kader-kader partai pada pemilu. Andrew Reynold²² menyebut bahwa sistem pemilu akan mendorong partai politik bekerja lebih baik. Sistem pemilu yang baik akan mendorong partai politik untuk memperbaiki organisasi internalnya, lebih memperhatikan isu-isu masyarakat, dan bekerja untuk para pemilihnya.

Pada dasarnya, sistem pemilu adalah suatu instrumen untuk mengagregasikan prefensi pemilih dan mengubahnya ke dalam hasil pemilihan, dan tidak ada sistem dapat melakukan ini sebagai suatu penerjemah pasif kehendak individual ke dalam suatu pilihan kolektif. Setiap sistem pemilu memiliki bias yang terbentuk ke dalam mekanisme keputusannya, dan ini kemudian berbalik ke dalam struktur keputusan yang membenturkan pemilih, membandingkan dan mengubah pilihan-pilihan yang mungkin mereka buat di bawah sistem lainnya.

Konsekuensinya, tidak hanya terdapat refleksi yang tidak sempurna atas preferensi pemilih dalam contoh pertama, tetapi preferensi pemilih itu terbentuk oleh sistem pemilu. Preferensi tidak dan tidak dapat hadir secara independen. Sistem pemilu juga membentuk dan membatasi jalan di mana politisi dan konstituen bertindak atau berperilaku, tetapi sistem tersebut hanya sebagian kecil dari kekuatan yang mempengaruhi konstelasi keseluruhan dari perilaku, bahkan perilaku politik.

Stagnasi, Stabilisasi dan Fluktuasi Volatilitas Elektoral Partai Islam

Dalam sejarah pemilu di Indonesia, blok partai Islam pernah memperoleh dukungan yang signifikan pada Pemilu 1955. Partai Islam memperoleh dukungan kurang lebih 43,9%,²³ dengan total kursi sebanyak 116 kursi. Perolehan suara blok partai Islam itu lebih tinggi dibandingkan dengan blok suara partai nasionalis, dan sosialis (komunis). Walaupun suara blok partai Islam tinggi, bukan berarti secara politik suara mereka sama, karena antarblok partai Islam sendiri sering terjadi pertentangan dan gesekan politik, dengan agenda politik yang tidak sama.

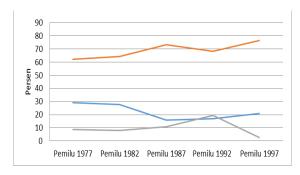
Perkembangan partai-partai Islam selanjutnya di masa Orde Baru—nyaris "tenggelam," tidak bisa berkembang secara optimal karena tekanan dan intervensi Orde Baru. Kebijakan penyederhanaan partai melalui fusi partai politik pada 1973 menyebabkan blok partai Islam yang tumbuh di era pemerintahan Orde Lama, dikerdilkan melalui pengelompokkan dengan lahirnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan blok partai nasional melalui Partai Demokrasi Indonesia.

²⁰ Muhammad Asfar (ed.), *Model-model Sistem Pemilihan di Indonesia*, Surabaya: Pusat Studi Demokrasi dan HAM bekerja sama dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia, 2002, hlm. 4.

²¹ Muhammad Asfar (ed.), "Model-model Sistem Pemilihan...," hlm. 4

²² Andrew Reynolds, "Merancang Sistem Pemilihan Umum" dalam Juan J. Linz, et.al., *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-negara Lain*, Bandung: Mizan, 2001, hlm. 102.

²³ Gabungan perolehan suara antara Masyumi (20,9%), NU (18,4%), PSSI (2,9%), Perti (1,3%) PPTI (0,2%), dan AKUI (0,2%). Tentang kegagalan partai Islam dalam Pemilu 1999, lihat misalnya, Syamsuddin Haris, "Politicization of Religion and the Failure of Islamic Parties in the 1999 General Election", dalam Antlov dan Cederroth, ed, *Election in Indonesia: The New Order and Beyond*, (London and New York: RoutledgeCurzon, 2004), hlm. 77-110.



Grafik 1. Perolehan Suara Golkar, PPP, PDI pada Pemilu-Pemilu Orde Baru

Sumber: diolah dari data KPU oleh tim peneliti.

Di era reformasi, blok partai (Islam dan Nasionalis) yang dikubur dan diharamkan oleh Orde Baru tumbuh kembali seiring dengan dibukanya kebebasan berserikat dan berkumpul, khususnya untuk mendirikan partai politik menjelang Pemilu 1999—pemilu pertama era reformasi. Tercatat 19 partai Islam yang ikut menjadi peserta pemilu dengan perolehan suara 37,59 %, sedangkan blok partai nasionalis sebanyak 29 partai dengan perolehan suara 62,41 persen. Perolehan blok partai Islam di era reformasi cenderung fluktuatif, dengan perolehan dukungan paling tinggi sebanyak 38,54 persen pada Pemilu 2004. Penurunan drastis terjadi pada Pemilu 2009 dan Pemilu 2014.

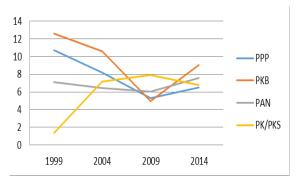
Tabel 3. Perbandingan Jumlah Parpol dan Perolehan Suara Blok Partai Islam dan Nasionalis pada Pemilu-Pemilu Era Reformasi

Pemilu	Partai Islam		Partai N (Nasio	
	Jumlah parpol	Per- olehan	Jumlah parpol	Per- olehan
	peserta pemilu	suara (%)	peserta pemilu	suara (%)
1999	19	37,59	29	62,41
2004	7	38,54	17	61,46
2009	9	25,94	35	74,06
2014	5	31,39	7	68,61

Sumber: diolah dari berbagai sumber oleh tim peneliti.

Dari empat partai Islam yang memiliki kursi di DPR dan lolos *electoral threshold* (ET) dan/atau *parliamentary threshold* (PT) sejak Pemilu 1999 hingga Pemilu 2014 yaitu PPP, PKB, PAN dan PK/PKS, ada kecenderungan pola dukungan pemilih terhadap blok partai Islam semakin

menurun. Dukungan paling signifikan pemilih terhadap blok partai Islam terjadi pada Pemilu 1999. Selebihnya, dukungan pemilih dari pemilu ke pemilu (1999 ke 2004; dan 2004 ke 2009) terhadap blok partai Islam terus mengalami penurunan. Kenaikan signifikan dialami oleh PKS pada Pemilu 2004, dengan memperoleh suara sebesar 7,20 persen (meingkat 5,85%). Gambaran sebaliknya terjadi peningkatan relatif sedikit dukungan terhadap partai-partai Islam (PPP, PKB dan PAN) pada Pemilu 2014, tetapi PKS justru mengalami penurunan.



Grafik 2. Perolehan Suara PPP, PKB, PAN, dan PKS pada Pemilu Reformasi

Sumber: diolah dari data KPU oleh tim peneliti.

Tabel 4. Perolehan Suara PPP, PKB, PAN, dan PKS pada Pemilu Reformasi

Parpol	Pemilu				
	1999	2004	2009	2014	
PPP	10,71	8,16	5,33	6,53	
PKB	12,60	10,61	4,95	9,04	
PAN	7,11	6,41	6,03	7,57	
PK/PKS	1,35	7,20	7,89	6,79	

Dari perolehan suara partai-partai Islam di atas, PPP tampaknya terus mengalami penurunan suara, kalau pun terjadi kenaikan dukungan "sangat sedikit." Ada gejala bahwa PPP mengalami stagnasi elektoral, pada kisaran angka dukungan antara 5-6 persen. Sementara itu, PAN relatif mengalami tingkat stabilitas yang lebih baik ketimbang PPP, karena kecenderungan perolehan suaranya antara 6-7 persen. Demikian pula dengan PKS, besaran dukungannya antara 6-8 persen. PKB yang relatif mengalami fluktuasi dukungan dengan jarak yang relatif tinggi, khususnya pada Pemilu 2004 ke Pemilu 2009 dan dari Pemilu 2009 ke Pemilu 2014.

Kalau dihitung dengan rumus volatilitas elektoral (Ve), dengan menggunakan indeks Pedersen (lihat lampiran), menunjukkan bahwa Ve Blok partai Islam pada Pemilu 1999 dengan Pemilu 2004 adalah Ve yang paling tinggi, sebesar 9,43%, sedangkan pada Pemilu 2004 ke Pemilu 2009 sebesar 7,36% dan dari Pemilu 2009 ke Pemilu 2014 sebesar 5,58%. Tingkat volatilitas blok partai Islam ini memang kecil dibandingkan dengan dengan tingkat volalititas pemilu-pemilu di Indonesia, di mana Ve pemilu di era reformasi berkisar antara 27-29 persen. Data Ve blok partai Islam di atas memperlihatkan bahwa tingkat rata-rata Ve blok partai Islam antara 5-9 persen. Artinya tingkat kemungkinan naik turunnya suara partai blok Islam paling tinggi tidak akan melebihi 9 persen, dan paling rendah 5 persen.

Sementara itu kalau dilihat dengan Ve masing-masing partai Islam dengan menggunakan rumus Scott Mainwaring, tampak bahwa PPP, PAN dan PKS memiliki kecenderungan Ve yang kecil (<1%), dibandingkan dengan PKB yang jarak Ve dari pemilu ke pemilu relatif besar (antara 1,5-2,5 persen). Dari data Ve blok partai Islam dan masing-masing partai Islam menunjukkan bahwa tingkat kemungkinan Ve partai Islam sebenarnya tidak akan lebih dari 5 persen.

Tabel 5. Ukuran Volatilitas Elektoral Partai Islam (PPP, PKB, PAN, PKS)

Par Pol	Pen 20		Selisih Mutlak	Ve (di	Pemilu		Seli sih	Ve (di
	1999	2004	-	bagi 2)	2009	2014	Mut lak	bagi 2)
PPP	10,71	8,16	2,55	1,275	5,33	6,53	1,2	0,6
PKB	12,6	10,61	1,99	1,56078	4,95	9,04	4,09	2,045
PAN	7,11	6,41	0,7	0,4485	6,03	7,57	1,54	0,77
PK/ PKS	1,35	7,2	5,85	2,925	7,89	6,79	1,1	0,55
			11,09	5,5			7,93	3,95

Sumber: diolah oleh tim dengan menggunakan rumus Scot Mainwairing.

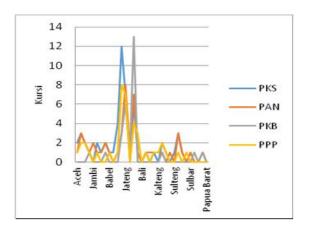
Kecenderungan volatilitas elektoral di atas menunjukkan bahwa PPP, PAN dan PKS relatif tidak memiliki faktor yang dapat melonjakkan perolehan suaranya dibandingkan dengan PKB. Artinya ada kecenderungan kuat bahwa PPP, PAN dan PKS relatif akan memperoleh dukungan pada kisaran suara antara 5-7 persen. Sementara itu, PKB yang relatif mempunyai faktor elektoral

volatilitas yang lebih kompleks, pada satu sisi bisa secara fluktuatif menurun tajam—mana kala terjadi konflik atau kerapuhan internal, dan cenderung stabil atau meningkat manakala terjadi konsolidasi politik, atau tetap memiliki hubungan yang baik dengan NU.

Volatilitas elektoral partai-partai Islam juga menunjukkan bahwa mereka relatif memperebutkan basis massa yang tidak terlalu berbeda ("Umat Islam") dengan tingkat kompetisi yang relatif mirip. Artinya, partai-partai Islam cenderung memperebutkan basis masa yang cenderung identik.

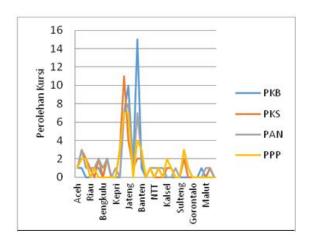
Hal itu tampak dari perbadingan sebaran perolehan kursi partai Islam pada Pemilu 2009 dan 2014—yang tidak terlalu mengalami perubahan sumber daerah pemilihan yang memberikan kontribusi dukungan suara dan kursi.

Tabel 6. Perbandingan Sebaran Perolehan Kursi Partai Islam Pemilu 2009



Sumber: diolah oleh tim dari data perolehan kursi blok partai Islam berdasarkan Dapil pada Pemilu 2009.

Tabel 7. Sebaran Perolehan Kursi Partai Islam pada Pemilu 2014



Sumber: diolah oleh tim dari data perolehan kursi blok partai Islam berdasarkan Dapil pada Pemilu 2014.

Kompetisi partai-partai Islam cenderung berada pada daerah pemilihan yang terpusat di Jawa, dan sebagian kecil di luar Jawa Kawasan Indonesia Barat. Sementara tingkat dukungan di daerah-daerah pemilihan Luar Jawa Kawasan Indonesia Timur relatif masih sangat rendah.

Faktor yang Memengaruhi Volatilitas Elektoral Partai Islam

Secara umum, hasil kajian ini menemukan tiga pola volatilitas elektoral partai-partai Islam, vaitu stagnan, stabil dan fluktuatif. Stagnasi elektoral misalnya terjadi pada PPP. Ada sejumlah faktor yang menjadi penyebabnya, antara lain, pertama, PPP –memiliki usia jauh lebih tua dibandingkan dengan partai-partai Islam lainnya seperti PKB, PAN, dan PKS. Walau demikian, PPP justru tidak bisa keluar dari perangkap ideologi Islam yang diusungnya. PPP mengalamai "kegalauan ideologi," akibat tidak berhasil menerjemahkan Islam sebagai ideologi yang menarik bagi para pemilih. Problem ideologi yang diterapkan oleh PPP dan beberapa partai Islam lainnya seperti PKS, justru menyebabkan dilema elektoral. PKS dapat disebut sebagai satu di antara partai Islam yang relatif berhasil menerjemahkan ideologi dalam organisasi partai dan kadernya.

Islam sebagai ideologi dan identitas simbolik, diterjemahkan sebagai ideologi organisasi dan dipraktikkan oleh kader-kadernya dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, dari sisi integritas dan moralitas justu ada paradoks, di mana perilaku sebagian kadernya dianggap "kurang Islami," akibat beberapa kadernya terjerat persoalan korupsi dan lainnya. Hal itu yang justru menyebabkan para simpatisan PKS (pemilih) pada Pemilu 2004 tidak dapat dipertahankan. Simpatisan PKS justru "meninggalkan" PKS pada Pemilu 2009 dan 2014. PKS kehilangan *branding* sebagai partai bersih.

Sementara itu, PKB dan PAN,24 dua partai yang ideologi dan asasnya terbuka (tidak berideologi Islam) secara politik elektoral juga mengalami masalah yang relatif sama. Tidak terlalu ada pengaruh "keterbukaan ideologi" PAN dan PKB sebagai magnet untuk mendulang suara. PKB dan PAN masih dianggap sebagai partai yang lekat dan dekat dengan simbol-simbol Islam. Kedekatan emosional dan historis antara PKB dengan NU yang melahirkannya, dan PAN dengan sebagian besar kader Muhammmadiyah,²⁵ relatif menguntungkannya. PKB dan PAN relatif memiliki kader yang lebih jelas ketimbang PPP. Sementara PKS mencoba menampung aspirasi politik umat Islam yang tidak NU dan tidak Muhammadiyah, tetapi lebih didukung oleh gerakan tarbiyah yang berkembang di kampuskampus pada era 1980-an.

Secara kinerja elektoral, PKB tetap bertumpu pada figur Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Garis kebijakan PKB dalam kinerja elektoral dilakukan dengan cara tetap mempertahankan peran tokoh sentral Gus Dur sebagai magnet politik untuk memperoleh dukungan pemilih dari kalangan NU. Bagi PKB, figur Gus Dur adalah figur yang

²⁴ PAN merupakan partai politik yang berasaskan Pancasila. Identitasnya bersumber dari asas partai yang terpantul dari keterkaitannya pada moral agama yang menghargai harkat kemanusiaan dan kemajemukan sosial kutural dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat, keadilan sosial dan kehidupan yang cerdas. PAN juga bersifat terbuka dan mandiri, dalam arti terbuka bagi warga negara Indonesia yang berasal dari berbagai pemikiran, latar belakang etnis dan agama, juga gender. Bambang Setiawan dan Bestian Nainggolan (Ed), *Partai-partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004), hlm. 233.

²⁵ PAN dideklarasikan pada 23 Agustus 1998. Dalam *platform* yang disusun ketika itu, partai ini bertugas memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, kemajuan dan keadilan sosial. Cita-cita partai berakar pada moral agama, kemanusiaan, dan kemajemukan. Sedangkan prinsip yang dianutnya adalah nonsektarian dan nondiskriminatif.

tetap erat hubungannya dengan PKB, dan Gus Dur merupakan salah satu faktor untuk menarik kembali masa Islam yang dahulu loyal kepada Gus Dur untuk kembali memilih PKB. PKB tetap mengandalkan pola *vote getter*, di mana tokohtokoh kiai atau keluarga kiai melalui jaringan pesantrennya tetap dijadikan sebagai pendulang suara yang paling dominan. Hubungan itu dirajut dengan memperbaiki silaturahmi politik antara PKB dengan NU, baik secara kultural maupun struktural.

Visi PKB yang relatif "disamakan" dengan visi ideologis NU, termasuk perubahan struktur organisasi yang dilakukan oleh Muhaimin Iskandar adalah satu cara untuk tetap memelihara kedekatan PKB dengan NU. Upaya itu dilakukan untuk mengembalikan lumbung suara PKB yang hilang pada Pemilu 2009, akibat konflik internal PKB yang berkepanjangan.

Secara ideologis memang ada proses sekularisasi pada PKB. PKB menerapkan ideologi secara longgar dan terbuka dengan harapan dapat menarik dukungan pemilih yang lebih luas, khususnya konstituen di luar pemilih NU yang berada di luar garis ideologi ke-NU-an dengan melakukan gerakan-gerakan sekulernasionalis di satu sisi, dan di sisi lain tetap mempertahankan basis dukungan pesantren. PKB juga menjalankan strategi ganda yaitu dengan memaksimalkan fungsi sayap-sayap partai, seperti sayap legislatif, sayap eksekutif nasional, sayap eksekutif daerah. Pilkada-pilkada yang di gelar di daerah-daerah dengan mendorong kader-kader ataupun non-kader yang menjadi simpatisan PKB menjadi motor pendongkrak suara partai. Perekrutan berbagai kalangan termasuk artis juga dilakukan oleh PKB dalam pemilu 2014. Tercatat ada Krisna Mukti dan Arzetty, yang berhasil menjadi anggota DPR RI 2014-2019.

Sementara itu ada beberapa artis lain yang meraup perolehan suara kurang lebih 35.000 suara, namun tidak lolos ke Senayan. Walaupun tidak lolos, jumlah suara yang dikumpulkan tetap memiliki arti bagi PKB. PKB juga mengoptimalkan peran Raja Dangdut Rhoma Irama yang digadang-gadang menjadi Calon Presiden RI ke 7 dari PKB, dianggap turut mendorong kenaikan suara PKB pada Pemilu

2014. Model kampanye yang berbasis hiburan dengan menempatkan juru kampanye Raja Dangdut dan artis sekelas Ahmad Dani, Mahfud MD mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, hingga Rusdi Kirana Direktur Utama maskapai Lion Air, dan lain-lain, dianggap memiliki pengaruh terhadap perolehan suara PKB.

Relatif sama dengan PKB, PAN tetap mempertahankan figur Amien Rais (AR) sebagai salah satu magnet untuk memperoleh dukungan dari kader dan pemilih Muhammadiyah. Sementara dari sisi ideologi, di mana PAN menetapkan ideologi dan asas partai yang bukan agama, tetapi identitas partai yang inklusif, bukan tanpa resiko. Resiko positifnya, seperti dicatat dalam laporan Tempo ketika awal kehadiran PAN (5-11 Januari 1999), bahwa pilihan itu akan memungkinkan terjadinya perluasan basis suara PAN yang semula diperkirakan akan hanya terbatas pada basis kelompok tertentu, seperti Muhammadiyah.

Dengan ideologi yang inklusif, PAN mengharapkan akan memperoleh dukungan pemilih yang lebih luas. Pilihan itu bukan tanpa resiko. Resiko negatifnya, PAN bisa kehilangan sebagian pendukung dari Muhammadiyah. Kemungkinan lain yang dihadapi PAN misalnya, sejumlah warga Muhammadiyah bisa lari meninggalkan PAN begitu partai ini memutuskan untuk menjadi partai yang inklusif. Identitas seperti itu sebenarnya bisa menjadi modal politik bagi PAN untuk mendapatkan kontinuitas dukungan di masyarakat. Tinggal bagaimana dengan karakter partai yang terbuka tersebut PAN dapat melakukan perluasan dukungan dari pemilu ke pemilu. Salah satu ciri karakter politik elektoral di Indonesia umumnya menyukai sifat yang moderat atau inklusif. Maka semakin partai politik menunjukkan bahwa kemoderatannya atau inklusif semakin mereka berpeluang meraih suara.

Untuk memperoleh itu, rancang bangun struktur organisasi PAN ini disusun dengan mengkombinasikan beberapa standar organisasi yang telah ada dan menyesuaikannya dengan kebutuhan partai. Struktur organisasi didesain agar target dan program partai bisa berjalan lancar serta dapat mengakomodasi semua kepentingan dan gagasan. Namun dalam perkembangannya,

justru perbedaan itu mulai berubah, karena ternyata dalam pengisian kepengurusan PAN selanjutnya, sebagian besar mereka yang duduk dalam jajaran kepengurusan pernah aktif dan dikenal sebagai tokoh dari Muhammadiyah, yang memang memiliki keterkaitan historis dengan PAN.

Hal ini justru menegaskan kedekatan secara politik partai ini dengan partai-partai yang secara tegas menyatakan diri sebagai partai Islam. Namun demikian, PAN tetap memberi ruang yang lebih lebar dan luas pada generasi muda untuk duduk dalam kepengurusan partai sebagai proses regenerasi dan kaderisasi. Pada derajat tertentu, organisasi partai juga mulai didorong untuk berubah, di mana kepemimpinan yang awalnya pada figur diubah ke institusi. Walaupun ada ruang yang luas dan lebar pada masuknya generasi muda dan sejumlah tokoh pada struktur PAN, namun sisa-sisa personifikasi beberapa sosok yang pernah memimpin PAN masih terasa. Pengaruh besar Amien Rais di PAN tidak bubar, masih tetap memiliki pengaruh pada perkembangan PAN baik secara organisasi, ideologi, dan garis kebijakan partai. PAN seperti juga partai Islam lainnya, tidak terbebas dari faksi-faksi yang diakibatkan oleh perbedaan dalam memahami Islam dan politik, meskipun faksi-faksi tersebut belum menimbulkan konflik terbuka. PAN relatif memiliki tingkat kohesi internal partai yang lebih baik ketimbang PPP dan PKB, karena mereka mengelola perbedaan yang disadari sejak awal sebagai unsur penopang pendirian PAN.

Secara garis besar ada empat faksi menonjol di PAN, yaitu: pertama, mereka yang berpandangan atau kelompok moderat terlihat pada Amien Rais, M. Amin Azis, Muhammad Siswosoedarmo, dan Abdillah Toha. Kubu kedua, adalah mereka yang berideologi sosial demokrat. Representasi kubu ini umumnya dari mereka yang berlatar belakang akademisi atau pegiat LSM, seperti Faisal Basri, Toety Heraty, M. Dawam rahardjo, Syamsurizal Panggabean, Sandra Hamid, Taufik Abdullah. Ketiga, kelompok minoritas non-Islam yang selalu memperjuangkan ide-ide pluralisme. Kelompok ini dihuni seperti Th. Sumartana dan Sindhunata. Kelompok keempat, kubu Islam ideologis yang dipelopori oleh AM. Fatwa yang

termasuk dalam kelompok ini adalah tokoh-tokoh terkemuka Muhammadiyah.²⁶

PPP sebagai partai Islam—pada konstelasi pemilu di era reformasi—relatif tidak menjadi wadah politik NU baik secara struktural maupun kultural. Kader-kader NU memang tetap sebagian besar di PPP—tetapi dalam realitasnya, kader-kader NU yang tidak terpakai di PKB dan kader MI yang tidak di PAN, alternatifnya ke PPP atau ke partai-partai nasionalis lainnya.

Dari akar historis, PPP sebenarnya memiliki dukungan yang masih cukup kuat dari kaderkader Parmusi, yang sebagian besar merupakan pendukung setianya sejak pemilu di masa Orde Baru hingga masa reformasi. Perolehan suara PPP 10,71 persen tampaknya tidak dapat bertahan lama, karena pada pemilu selanjutnya, Pemilu 2004, justru suara PPP turun 2,5 persen. Demikian pada pemilu berikutnya, pada Pemilu 2009 suara PPP turun 2,83 persen, sebagai penurunan suara yang paling signifikan.²⁷

Nasib PPP agak beruntung karena pada Pemilu 2014, perolehan suara PPP mengalami kenaikan 1,2 persen. Salah satunya dianggap sebagai keberuntungan, karena beberapa partai Islam seperti PKNU gagal sebagai peserta pemilu. Penurunan itu juga dikarenakan PPP mengalami perpecahan menjelang Pemilu 2004. Saat kepemimpinan PPP di bawah Hamzah Haz (1998-2003 dan 2003-2007) sengketa internal terjadi. K.H. Zainuddin MZ yang kecewa bersama dengan beberapa tokoh PPP lainnya mendirikan PPP Reformasi. Partai tersebut kemudian berubah nama menjadi Partai Bintang Reformasi (PBR) pada 2003.

Secara umum, stagnasi perolehan suara PPP disebabkan oleh faktor internal dan ekternal. Salah satu faktor yang menjadi perdebatan tidak bekerjanya volatilitas elektoral PPP atau partai-partai Islam lainnya adalah sejauhmana pengaruh ideologi Islam dapat menjadi magnet bagi PPP untuk memperoleh dukungan dari pemilih yang beragama Islam. Lebih dari itu bagaimana ideologi Islam dan simbol Ka'bah

²⁶ Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik Pasca-Soeharto*, (Jakarta: LP3ES, 2003), hlm. 155.

²⁷ Tantangan yang dihadapi oleh PPP ini dapat dilihat pada Abul Aziz, *Politik Islam Politik: Pergulatan Ideologis PPP Menjadi Partai Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 2-5.

yang diusung oleh PPP mampu menembus batas psikologis pembelahan sosial pemilih di Indonesia. Atau unsur-unsur PPP manakah yang mampu menjadi daya tarik sehingga pemilih rela untuk memberikan suaranya.

PPP juga mengalami disorientasi ideologi. Hal itu mengingatkan pada kasus yang hampir sama di masa lalu, ketika PPP mengalami kekaburan ideologi sejak Muktamar I Tahun 1984. Pada Muktamar I tersebut, PPP secara resmi menanggalkan asas Islam dan lambang Ka'bah menjadi berasaskan Pancasila dan bintang dalam segi lima. Kekaburan ideologi bahkan keinginan untuk meninggalkan ideologi Islam. PPP justru ingin dibawa ke ideologi "tengah" antara Islam dan Nasionalis yang tidak tegas. PPP relatif gamang menghadapi perubahan politik di era reformasi, sejak sebagian tokohtokoh NU yang dimotori oleh K.H. Abdurrahman Wahid mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa dan sebagian besar warga Muhammadiyah terlibat dalam kelahiran Partai Amanat Nasional.

Persoalannya, ideologi Islam seperti apa yang yang hendak dikembangkan dan diimplementasikan oleh PPP dalam konteks ke-Indonesiaan yang sedang berubah. Problem ini yang belum tuntas diselesaikan oleh PPP. PPP relatif gagal menerjemahkan ideologi Islam dalam konteks organisasi dan Islam sebagai ideologi yang membumi. PPP juga relatif mengalami persoalan dalam membedakan dirinya dengan partai-partai Islam lainnya seperti PKB, PAN, dan PKS dalam mendiferensiasi Islam sebagai sebuah ideologi.

PPP juga belum bisa keluar dari pola pengembangan partai yang sifatnya tradisionalis, mengandalkan jaringan Islam lama, mendekati tokoh-tokoh keagamaan yang memiliki pengaruh, menggunakan keturunan kyai kharismatik. PPP juga belum bisa keluar dari dua basis utama umat di Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah—walau yang di Muhammadiyah sangatlah sulit untuk menyebut mendukung PPP, karena sebagian pilihan pemilihnya sudah berpindah secara variatif, sebagian ke PAN, sebagian ke partai nasional dan partai Islam lainnya.

Naik turunnya suara PPP juga dipengaruhi oleh arah pengelolaan partai yang tidak jelas dalam mengemas ideologinya untuk diperkenalkan kepada masyarakat. Kegagalan dalam mengelola sumber daya internal (kader) dan material menjadi salah satu sebabnya. Hal itu salah satunya dipengaruhi oleh ketidakberdayaan partai untuk memberikan insentif substantif kepada para anggotanya.

Kebanyakan dalam konteks Indonesia, orang tertarik menjadi anggota partai karena berharap memperoleh pekerjaan. Orang masuk ke partai politik untuk bekerja bukan orang masuk ke partai politik untuk menjadi aktivis politik. PPP terjebak pada arus politik lama yang cenderung "tradisionalis." Pengelolaan partai politik mengandalkan jalur kekerabatan politik dan unsur-unsur lama kader militannya. PPP juga terjebak pada situasi politik yang sedang berubah yang menuntut "perbedaan" antara partai yang tumbuh di era Orba dengan era Reformasi. Perubahan formulasi sosial umat Islam dalam konteks politik tidak diantisipasi dengan baik. PPP justru kurang berhasil mendekati formulasi sosial umat Islam yang baru yang memerlukan ruang berekspresi secara politik.

PPP juga kesulitan mengembangkan pengaruh sayap partai. Tidak terlalu terjadi pergeseran yang signifikan antara sebaran dukungan PPP pada masa Orba dan masa reformasi. Pada Pemilu 1977, pemilu pertama era Orba sejak fusi 1973, PPP memperoleh kursi di 22 provinsi waktu itu. Dukungan politik pada PPP relatif tidak mengalami perubahan secara signifikan dari pemilu-pemilu masa Orba hingga reformasi.

Pada pemilu di era reformasi, pola dukungan terhadap PPP justru cenderung mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Dari segi dukungan wilayah, gambaran di atas menegaskan temuan Anis Bawesdan yang menyebut adanya korelasi signifikan antara dukungan untuk partai Islam di setiap Kota dan Kabupaten selama dua pemilu. Pola dukungan politik terhadap PPP secara garis besar dapat digarisbawahi bahwa unsur-unsur pendukung lama, khususnya sebagian besar unsur Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) kemungkinan besar masih menjadi mesin PPP dalam mempertahankan suaranya pada pemilu. Di era reformasi, Parmusi—meski beberapa kadernya sempat kecewa dengan kepemimpinan Hamzah Haz dan Suryadharma Ali, namun secara umum unsur Parmusi dapat disebut masih memberi kontribusi yang relatif besar pada PPP ketimbang ketiga unsur lainnya khususnya NU dan Muhammadiyah.

Beberapa kecenderungan faktor elektoral yang terjadi pada partai-partai Islam di atas, juga dialami oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS merupakan metamorfosa dari Partai Keadilan (PK), yang didirikan oleh para anak muda mantan aktivis Islam dikampus dan masjid. Bagi para pendirinya, PK bukanlah partai politik an sich, tetapi lebih dari itu, ia juga bagian dari dakwah.

Secara historis, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan (PK) yang dibentuk pada tahun 1998. Bila dilihat dari latar belakang kemunculannya, pendirian PK merupakan respon konkret para aktivis dakwah kampus yang memanfaatkan momentum reformasi pasca berakhirnya rezim orde baru. Para aktivis dakwah kampus tersebut tergabung dalam gerakan dakwah kampus yang popular disebut gerakan tarbiyah,²⁸ yang secara aktif mereka mengkaji Islam serta berusaha mengaplikasikannya dalam kehidupan seharihari. Masjid kampus adalah basis yang dijadikan benteng pertahanan sekaligus basis gerakan. Gerakan itu menyebar di kampus-kampus dan masyarakat umum, terutama lebih menonjol pada kampus-kampus besar seperti Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Institut Teknologi 10 November Surabaya (ITS). Para perintis dari beberapa kampus besar pada gerakan ini pun juga mengajak para mahasiswa yang dikadernya untuk mewujudkan Islam secara kaffah (menyeluruh) dan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai partai politik, perolehan suara PKS relatif tidak beranjak sebagai partai menengah, dengan jarak perolehan suara berkisar antara 6-7 persen. Sebagai partai yang relatif baru, perolehan suara PK tersebut tergolong cukup signifikan, mengingat ia merupakan sebuah partai baru yang dipimpin oleh anak muda yang tidak memiliki hubungan geneologis dengan partai-partai Islam sebelumnya, maupun dengan ormas-ormas Islam mainstream (NU dan Muhammadiyah). Bahkan PK bisa mengungguli perolehan suara beberapa partai Islam lainnya yang mengklaim sebagai pewaris partai-partai Islam masa lalu.²⁹

Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Liddle bahwa PK mewakili kelompok Islam baru yang tidak berakar pada kekuatan organisasi modernis yang pernah ada di Indonesia. Pemilihnya berasal dari latarbelakang perkotaan dan terkonsentrasi pada universitas terkemuka dimana kebanyakan pemimpinnya juga pengajar dan peneliti.

Fenomena PK—sebagai salah satu bagian dari sejarah PKS—cukup signifikan karena PK pada Pemilu 1999 menang di DKI Jakarta. Secara signifikan, PKS mengalami masa keemasan dukungan pada Pemilu 2004. Peningkatan suara yang sangat signifikan itu tidak lepas dari strategi ganda yang dilakukan PKS, yaitu memadukan dua konsep antara politik dan Islamisme dan good governance (dengan slogan bersih dan peduli).³⁰ Di lain pihak, PKS melihat keberhasilan tersebut terjadi karena slogan "bersih dan peduli" sebagai party ID yang membedakan PKS dengan partai lainnya. Faktor internal juga bekerja, di antaranya adalah faktor kepemimpinan Ustadz Hilmi Aminuddin dan kualitas kader yang mendukung.31

Dari segi perilaku pemilih, peningkatan suara PKS bukan semata-mata karena performa PKS yang bagus pada periode sebelumnya, tetapi di antaranya karena publik tidak punya pilihan lain. PKS berhasil menarik simpatisan lintas partai pada komunitas pemilih Islam. Sebaran

²⁸ Gerakan tarbiyah merupakan gerakan yang mengedepankan aspek pendidikan atau pembinaan jamaah dengan mengacu pada marhalah dakwah yang ditempuh Rasulullah, berusaha mengaplikasikan Islam secara menyeluruh (kaffah), komprehensif (syamil), dan manusiawi (insani). Gerakan Tarbiyah itu terdiri dari lima elemen penting: pertama, DDII (Dewan Dakwah Islam Indonesia) yang merupakan transformasi dari Masyumi dengan tokoh utamanya adalah Mohammad Natsir. Kedua, elemen jaringan dakwah kampus (LDK) sebagai tulang punggung Tarbiyah dan sekolah (ROHIS). Ketiga, elemen para alumnus perguruan tinggi luar negeri, khususnya Timur Tengah. Keempat: para aktivis ormas Islam maupun kepemudaan Islam. Kelima, para da'i lulusan pesantren.

²⁹ Lili Romli, "Model Pelembagaan Partai...," hlm. 54

³⁰ Lili Romli, "Model Pelembagaan Partai...," hlm. 54

³¹ Arief Munandar, *Antara Jemaah dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004*, Disertasi, (Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2011), hlm. 369

dukungan PKS pun mulai meluas jika dilihat dari sejarah pendiriannya yang baru berumur sekitar 5 tahun. dukungan atau basis suara PKS mencakup Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, jawa tengah, Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku dan Maluku Utara.³² Bagaimanapun faktor pelembagaan internal PKS yang relatif lebih bagus ketimbang partaipartai Islam lainnya, dengan terciptanya sistem kaderisasi mirip sistem sel, menjadikan PKS memiliki ideologi yang membedakannya dengan partai Islam lainnya. PKS berhasil menyusun paradigma Islam eksklusif dan inklusif dalam menerjemahkan ideologi partai.

Suasana itu tidak terjadi pada Pemilu 2009 dan 2014, karena faktor kinerja elektoral PKS relatif hanya mengandalkan kader-kader internalnya, dan PKS kehilangan simpatisan yang memilihnya pada Pemilu 2004. PKS nyaris tenggelam oleh problematik internal dan integritas kader-kadernya.33 Sirkulasi elit yang statis dan perilaku elit pada PKS pada beberapa kasus korupsi turut menjadi faktor turunnya suara PKS pada Pemilu 2009 dan 2014. Walaupun tidak separah PKB dan PPP, konflik internal PKS cenderung senyap, tidak terlalu gaduh, dan di tengah keterpurukan, kepemimpinan Anis Matta masih mampu mengkonsolidasikan internal PKS agar kader-kadernya tidak beralih dengan memilih ke partai lain. Pertarungan antara faksi keadilan dan kesejahteraan, yang sering disinyalir, sebenarnya tidak sesederhana itu.

PKS mengalami faksionalisasi yang lebih kompleks antar unsur inti elit dengan unsur-unsur lainnya. Ada faksi idealis, faksi konservatif, dan faksi progresif, faksi penantang, dan juga orientasi kelompok pendukung partai dengan gerakan religius kelompoik-kelompok tarbiyah lainnya yang berbeda orientasi dan gagasan.³⁴ Kohesi partai memang cenderung terlihat agak utuh, walaupun di dalamnya ada dinamika antar

kelompok yang dinamis, yang berhasil dikelola oleh PKS, tetapi juga dapat menjadi hambatan bagi perkembangan partai.

Secara umum, problematik kinerja elektoral partai-partai Islam hampir memiliki kesamaan antara satu partai dengan partai lainnya. Hingga Pemilu 2014, kinerja elektoral partai Islam masih belum bisa mendominasi suara pemilih umat Islam. Ada sejumlah faktor mengapa hal itu terjadi pada pada partai-partai Islam, antara lain: pertama, sejauh ini belum ada partai Islam yang berhasil memunculkan figur nasional, sebagai figur alternatif yang memiliki elektabilitas yang dapat dipersandingkan dengan tokoh-tokoh politik yang diusung oleh partai nasionalis. Sumber daya kader partai Islam relatif mengalami kemunduran, karena figur-figur yang muncul masih belum mampu menjadi alternatif bagi kepemimpinan nasional di masa depan.

Kedua, problem kemampuan dalam memimpin birokrasi. Kemampuan teknokratik yang rendah pada beberapa kader partai Islam di antaranya disebabkan oleh "peluang" yang sempit bagi kalangan muda Islam yang memiliki kemampuan teknokratik untuk memimpin partai Islam, seperti PPP, PKB, PAN, dan PKS, karena pola kepemimpinan mereka masih bersumber pada proses penjaringan yang sifatnya "tradisional." PKS dan PAN mungkin agak relatif berbeda, atau masih memiliki sejumlah kader yang memiliki tingkat teknokratik yang bisa diandalkan, ketimbang PPP dan PKB.

Ketiga, partai-partai Islam belum mampu menjadi ruang imajinasi bagi kalangan muda Islam yang jumlahnya sangat potensial sebagai pemilih. Tantangan partai-partai Islam yang dapat diterima oleh kalangan pemilih (komunitas Islam) yang tengah mengalami perubahan merupakan tantangan yang berat. Kehadiran ideologi, kepemimpinan dan tokoh-tokoh dianggap belum bisa mengayomi banyak kelompok, karena secara internal—Islam juga mengalami persoalan dengan lahirnya perbedaan-perbedaan dalam hal keagamaan. Pengkotak-kotakan itu juga menjadi salah satu faktor eksternal yang menyebabkan pemilih Islam, kurang tertarik pada partai-partai Islam.

Jarak ideologis pemilih di Indonesia dianggap menjadi salah satu faktor mengapa

³² Diolah dari data KPU oleh tim peneliti

³³ Syamsuddin Haris, Evaluasi Proses dan Analisis Hasil Pemilu Legislatif 2014, dalam Laporan Tim Pemilu Tematik, tahun 2014. tidak dicetak. hlm. 133

³⁴ Arief Munandar, "Antara Jemaah dan Partai Politik...," hlm. 146.

partai-partai Islam menjadi sebagian partai papan tengah, dan sebagian lagi mengarah pada partai papan bawah. Ideologi yang seharusnya sangat menentukan bagi keterpilihan partai di dalam pemilu tidak lagi terjadi di Indonesia. Saat ini, ideologi partai politik bersifat rendah dan *party identification*-nya pun bersifat rendah. Sebagai contoh, orang Islam tidak lagi secara pasti memilih partai yang berbasis Islam. Masyarakat sudah rasional dalam menentukan pilihan. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini terjadi adalah partai yang seharusnya menjadi sekolah ideologi bagi para kadernya nampaknya telah gagal menjalankan peran tersebut.

Keempat, *performance* partai-partai Islam yang masih lekat dengan "politik kelompok." Konflik internal di PPP yang berlarut-larut misalnya, dapat memengaruhi persepsi pemilih bahwa partai hanya menjadi "kendaraan politik" oleh orang-orang tertentu. Partai dianggap belum hadir ditengah persoalan yang sedang dihadapi oleh pemilih, dan partai justru menyimpan banyak masalah ketimbang menjadi solusi atas masalah yang dialami oleh masyarakat.

Kelima, faktor perubahan sistem pemilu dan kepartaian. Perubahan sistem pemilu ke arah sistem proporsional terbuka, menyebabkan terjadinya kompetisi bertingkat yang berat. Kompetisi internal partai dan kompetisi antarpartai begitu ketat. Apalagi, partai-partai Islam juga relatif memperebutkan basis pemilih Islam yang relatif sama. Perubahan perilaku pemilih yang lebih "transaksional," menyebabkan partaipartai Islam kesulitan untuk mengembangkan dukungan. Modal dana yang kecil dibandingkan dengan partai-partai nasionalis dianggap sebagai salah satu sebab mengapa dukungan pemilih yang sebagian besar beragama Islam tidak sepenuhnya mendukung partai-partai Islam. Partai-partai Islam pada pemilu di era reformasi kecenderungannya menempati posisi papan tengah dan bawah.

Keenam, kualitas parpol dapat dilihat dari beberapa sisi, yakni kejelasan *positioning* ideologi dan diferensiasi antarparpol; memudahkan pemilih untuk mengidentifikasi perbedaan principal and working ideology masing-masing partai serta meningkatkan *party-ID* di kalangan pemilih. Minimnya party-ID karena fragmentasi partai yang terlalu banyak membuat sistem kompetisi partai tidak lagi didasarkan pada ideologi dan programmatic appeals. Logika persaingan elektoral dalam sistem multipartai yang terlalu ekstrem tidak mengikuti asumsi representasi ideologi dan basis sosial partai, tapi mengarah pada "politik ke tengah" (political centrism). Partai-partai sengaja mengaburkan jenis kelamin ideologi mereka karena yakin proporsi pemilih berdiam di tengah (bukan ekstrem kiri maupun kanan). Pada titik inilah, mobilisasi finansial untuk memenangkan persaingan elektoral melalui iklan dan politik uang lebih ditempuh partai-partai ketimbang mengedepankan tawaran ideologi dan program. ³⁶

Masa Depan Partai Islam di Indonesia

Masa depan partai Islam dilihat dari dua hal yaitu stabilitas perolehan suara partai-partai Islam dari pemilu ke pemilu; dan eksistensi partai-partai Islam pada sistem politik, sistem kepartaian dan pemilu di Indonesia. Sebagaimana telah digambarkan di atas, stabilitas perolehan suara partai-partai Islam cenderung mengarah pada posisi partai Islam papan tengah (perolehan suara 7-10 persen) dan di bawah 7 persen (4-7 persen).

Masa depan partai Islam sebagai partai papan tengah dan bawah tersebut dipengaruhi oleh sikap dan perilaku politik pemilih "Islam" itu sendiri. Dalam konteks kinerja elektoral, selama masih ada santri dan pesantran—dan kelompokkelompok yang menggunakan identitas politik "Islam" sebenarnya dukungan terhadap partai Islam akan tetap terbuka dan besar. Persoalannya kecenderungan pemilih Islam yang berubah bagaimanapun akan memiliki pengaruh pada masa depan partai Islam itu sendiri.

Dari segi elektoral, dari empat partai Islam (PPP, PKB, PAN, dan PKS), PPP tergolong sebagai partai Islam yang riskan, karena perolehan suaranya cenderung mendekati garis

³⁵ Kacung Marijan, *Seminar* Sosialisasi Akhir Hasil Penelitian Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, di Jakarta, 13 November 2012.

³⁶ Burhanuddin Muhtadi, Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan pengajar FISIP UIN Jakarta, "Pro-Kontra Penyederhanaan Sistem Kepartaian", dalam http://www.lampungpost.com/opini/20730-pro-kontra-penyederhanaansistem-kepartaian.html, 5 Januari 2012.

parliamentary threshold (PT) yang diterapkan pada pemilu-pemilu era reformasi. Tabel pada lampiran tentang jarak perolehan suara partai dengan besaran PT menunjukkan kecenderungan itu. Dari segi pemilu, partai-partai Islam sebenarnya realistis hanya dapat eksis pada kisaran PT antara 2,5-3 persen. Lebih dari 3,5% atau 4%, kecenderungan berkurangnya partai Islam dalam sistem kepartaian dan pemilu di Indonesia akan sangat memungkinkan.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa partai-partai Islam hanya dapat tumbuh dan berkembang pada kisaran besaran daerah pemilihan menengah (7-8 kursi) dan besar (9-10 atau > 10 kursi). Partai-partai Islam yang cenderung memiliki dukungan suara papan tengah, secara empirik mengalami kesulitan untuk berkompetisi pada besaran daerah pemilihan 3-6 kursi, karena perolehan kursi partai-partai Islam hanya mengandalkan suara sisa pada penghitungan kedua dan ketiga.

Dalam konteks politik nasional, masa depan partai-partai Islam masih belum mampu sebagai alternatif untuk melakukan perubahan karena faktor perbedaan ideologi dalam membangun koalisi antarpartai Islam, dan dalam melahirkan sosok alternatif untuk kepemimpinan nasional.

Kelemahan kepemimpinan internal partai dan "belum" lahirnya sosok pemimpin dari kader-kader partai Islam yang menjadi magnet politik untuk menarik massa dan memiliki elektabilitas yang tinggi menyebabkan partai-partai Islam dalam kancah politik nasional hanya diperhitungan sebagai "dukungan politik" untuk memenuhi faktor representasi pemilih. Posisi dan peran mereka relatif hanya terasa sebagai faktor pelengkap dalam dinamika dan proses politik serta dalam perubahan yang sedang berlangsung.

Referensi

Buku

- Amalia, Luky Sandra. (Ed.). Kecenderungan Hubungan Anggota Legislatif dan Konstituen: Studi DPRD Provinsi Banten Hasil Pemilu 2009, Jakarta: LIPI Press. 2010.
- Ambardi, Kuskridho. Mengungkap Politik Kartel Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi. Jakarta: KPG. 2009.

- Amir, Zainal Abidin. *Peta Islam Politik Pasca-Soeharto*. Jakarta: LP3ES. 2003.
- Ananta, Aris, Evi Nurvidya Arifin, Leo Suryadinata. *Emerging Democracy in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. 2005.
- Antunes, Rui. "Party Identification and Voting Behavior: Structural Factors, Attitudes and Changes in Voting". *Doctoral Thesis*. University of Coimbra. 2008.
- Asfar, Muhammad. *Pemilu dan Perilaku Memilih* 1955-2004. Surabaya: Pustaka Eureka dan PusDeHAM. 2006.
- Choirie, A. Effendy. *Islam-Nasionalisme UMNO-PKB Studi Komparasi dan Diplomasi*. Jakarta: Pensil-234. 2008.
- Dhakiri, Muhammad Hanif dan kawan-kawan. *PKB Masa Depan*. Jakarta: DPP Partai Kebangkitan Bangsa. 2006.
- Dirdjosanjoto, Pradjarta. *Memelihara Umat: Kiai Pesantren-Kiai Langgar di Jawa*. Yogyakarta: LkiS. 2013.
- Evans, Kevin Raymond. Sejarah Pemilu & Partai Politik di Indonesia. Jakarta: PT. Aries Consultancies. 2003.
- Feith, Herbert dan Lance Castles. *Indonesian Political Thinking 1945-1965*. Itacha and London: Cornell University. 1970.
- Feith, Herbert. *Pemilihan Umum 1955*. Jakarta: LP3ES. 1985.
- Firmanzah. Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2011.
- Firmanzah. Persaingan Legitimasi Kekuasaan dan Marketing Politik-Pembelajaran Politik Pemilu 2009. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2010.
- Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. Chicago: The University of Chicago Press. 1960.
- Gherghina, Sergiu. Party Organization and Electoral Volatility in Central and Eastern Europe Enhancing Voter Loyalty. Oxon: Routledge. 2015.
- Halim, Abdul. *Aswaja Politisi Nahdlatul Ulama: Perspektif Hermeneutika Gadamer.* Jakarta: LP3ES. 2014.
- Hamad, Ibnu. Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Study Critical Discourse Analysis Terhadap Berita –berita Politik. Jakarta: Granit. 2004.
- Hefner, Robert W. Geger Tengger, Perubahan sosial dan Pertikaian Politik. Yogyakarta: LkiS. 1999.
- Horikoshi, Hiroko. *Kiai dan Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M. 1984.

- Ida, Laode. *NU Muda Kaum Progresif dan Sekularisme Baru*. Jakarta: Erlangga. 2004.
- Irsyam, Mahrus. *Ulama dan Partai Politik, Upaya Mengatasi Krisis*. Jakarta: Yayasan Perkhidamatan. 1984.
- Iskandar, A Muhaimin. Melampaui Demokrasi Merawat Bangsa dengan Visi Ulama. Refleksi Sewindu Partai Kebangkitan Bangsa. Yogjakarta: Klik.R. 2006.
- Kamarudin, Kamarudin. *Partai Politik Islam di Pentas Reformasi Refleksi Pemilu 1999 untuk Pemilu* 2004. Jakarta: Visi Publishing. 2003.
- Kompas, Tim Penelitian dan Pengembangan Kompas. Partai-Partai Politik Indonesia Ideologi, Strategi, dan Program. Jakarta: Kompas. 1999.
- Mainwaring, Scott dan Timothy R Scully. *Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America*. Stanford, California: Stanford University Press. 1995.
- Muchlis, Edison. (ed). *Pelembagaan Partai Politik* di Indonesia Pasca-Orde Baru. Jakarta: Pusat Penelitian Politik. 2007.
- Muhtadi, Burhanuddin. *Dilema PKS Suara dan Syariah*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. 2012.
- Mujani, Saiful, R. William Liddle, dan Kuskridho Ambardi. Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru. Bandung: Mizan. 2012.
- Najib, Muhammad dan K.S. Himmaty. *Amien Rais: Dari Yogya ke Bina Graha*. Jakarta: Gema Insani Press. 1999.
- Noer, Deliar (et.al.). Mengapa Partai Islam Kalah? Perjalanan Politik Islam Dari Pra-Pemilu '99 Sampai Pemilihan Presiden. Jakarta: Alvabet. 1999.
- Novianto, Kholid., Chaidar, Al., (ed). Era Baru Indonesia: Sosialisasi Pemikiran Amien Rais, Hamzah Haz, Nur mahmudi, Matori Abdul Djalil dan Yusril Ihza Mahendra, Cetakan I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1999.
- Pamungkas, Sigit. *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism. 2011.
- Price, Daniel E. *Islamic Political Culture, Democracy, And Human Rights: A Comparative Study*.
 USA: Praeger Publisher. 1999.
- Reid, Antony and Gilsenan, Michael (eds.). *Islamic Legitimacy in a Plural Asia*. London and New York: Routledge, Taylor and Francis Group. 2007.

- Romli, Lili. (ed). *Potret Partai Politik Pasca Orde Baru*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI.
 2003.
- Romli, Lili. Model Pelembagaan Partai Politik di Indonesia: Kasus Partai Keadilan Sejahtera, dalam Pelembagaan Partai Politik di Indonesia Pasca Orde Baru. Jakarta: LIPI Press. 2007.
- Setiawan, Bambang dan Bestian Nainggolan (Ed). Partai-partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2004.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia. 1998.

Jurnal

- Bird, Judith. "Indonesia in 1998: The Pot Boils Over," dalam *Asian Survey* Vol. 39, No. 1, 1999.
- Croissant, Aurel and Philip Volkel. "Party system types and party system institutionalization: Comparing new democracies in East and Southeast Asia," dalam *Party Politics* Vol.18, No.2, 2012.
- Ishomuddin, "Continuity and Change of Political Culture: Study on Scientific Insights and Political Understanding on Politicians of Political Parties in Indonesia," dalam *Asian Social Science* Vol. 10, No. 16, 2014.
- Liddle, R. William dan Saiful Mujani. "Indonesia in 2004: The Rise of Susilo Bambang Yudhoyono," dalam *Asian Survey*, Vol. 45, No. 1, 2005.
- Liddle, R. William. "Leadership, Party, and Religion Explaining Voting Behavior in Indonesia," *Comparative Political Studies*, Vol. 40, No. 7, 2007.
- Mietzner, Marcus. "Indonesia's 2009 Elections: Populism, Dynasties and the Consolidation of the Party System," dalam *Lowy Institute for International Policy*, 2009.
- Nurhasim, Moch. "Kegagalan Modernisasi Partai Politik di Era Reformasi," dalam *Jurnal Penelitian Politik* Vol.10, No.1, Juni 2013, Jakarta: LIPI Press.
- Romli, Lili. "Crescent and Electoral Strength: Islamic Party Portrait of Reform Era In Indonesia," dalam *International Journal of Islamic Thought*, Vol.4, 2003.
- Tan, Paige Johnson. "Indonesia Seven Years after Soeharto: Party System Institutionalization in a New Democracy," dalam *Contemporary Southeast Asia* Vol.28, No.1, 2006.
- Tomsa, Dirk. "Party System Fragmentation in Indonesia: The Subnational Dimension," dalam *Journal of East Asian Studies*, Vol.14, 2014.

Woodward, Mark. "Indonesia's Religious Political Parties: Democratic Consolidation and Security in Post-New Order Indonesia," dalam *Asian Security*, Vol.4, No.1, 2008.

Disertasi

- Firman Noor, "Institutionalising Islamic Political Parties in Indonesia: A Study of Internal Fragmentation and Cohesion in the Post-Soeharto Era (1998-2008)", *Disertasi*, (London: University of Exeter).
- Munandar, Arief. Antara Jemaah dan Partai Politik:
 Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan
 Sejahtera (PKS) dalam Arena Politik Indonesia
 Pasca Pemilu 2004. Disertasi. Depok: Fakultas
 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
 Indonesia, 2011.

Website

- "Ini Hasil Lengkap Rekapitulasi Perolehan Suara Pileg 2014", dalam http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/05/10/n5bgv5-ini-hasil-lengkap-rekapitulasi-perolehan-suara-pileg-2014, diunduh 10 Agustus 2014.
- Haris, Syamsuddin.. "PPP dan Gerakan Politik Islam", dalam http://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/14/11/14/nf0y4q-ppp-gerakan-politik-Islam, diakses pada 28 Februari 2015.
- Muhtadi, Burhanuddin. "Pro-Kontra Penyederhanaan Sistem Kepartaian," dalam http://www.lampungpost.com/opini/20730-pro-kontrapenyederhanaan-sistem-kepartaian.html, 5 Januari 2012.
- Supit Urang PKB Gus Dur, www.aananshori.com, diakses pada tanggal 21 september 2015.

Laporan Penelitian

- Amalia, Luky Sandra. (Ed.). "Evaluasi Sistem Kepartaian di Era Reformasi", *Laporan Penelitian*, Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2012.
- Haris, Syamsuddin. *Evaluasi Proses dan Analisis Hasil Pemilu Legislatif 2014*. Laporan Tim Pemilu Tematik, P2Politik Tahun 2014 (tidak dicetak).
- Mainwaring, Scott. "Rethingking Party System Theory In The Third Wave of Democratization: The Importance of Party System Institutionlization, Working Paper #260 – October 1998, Kellogg Institute.
- Romli, Lili. *Peta Kekuatan Partai Politik Hasil Pemilu 2014*. Laporan Tim Pemilu Tematik, P2Politik Tahun 2014 (tidak dicetak).

Surat Kabar

- Evans, Kevin. "Politik 'Aliran' yang Mana?". *Tempo*. 5 April 2009.
- Haris, Syamsuddin. "Masa Depan Parpol Islam," dalam *Seputar Indonesia*, 12 Oktober 2012.
- Haris, Syamsuddin. "Mengapa 'Partai Tengah'", dalam *Suara Pembaruan*, 31 Mei 2010.
- Haris, Syamsuddin.. "PPP dan Nasib Parpol Islam", dalam *Kompas*, 4 Juli 2011.
- Jakarta Post, Chinese-Indonesians and NU pray for sick 'father' Gus Dur, 7 September, 2009
- Kompas, *Menjaga Sinar Politik Sang Matahari*, 2 Maret 2015.
- Kompas, *Setelah Semua Perbedaan Diselesaikan*, 2 Maret 2015.
- Kompas, Zulkifli: Semua Harus Bersatu Kembali, 2 Maret 2015.
- Pramono, Sidik. Proporsional Terbuka Sitem yang Membuat Dilema, *Kompas*, 14 Maret 2007.

Sumber Lainnya

- Anggaran Dasar PAN, Tahun 1998.
- Anggaran Dasar PAN, Tahun 2010.
- Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa Pasal 3,4 dan 5
- Arah Perjuangan Politik Partai Kebangkitan Bangsa. Jakarta; DPP PKB, 2004.
- Dokumentasi Hasil Muktamar II PKB, Jakarta, DPP PKB, 2005
- Keputusan KPU No.416/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilu 2014
- KPU RI. *Modul I Pemilih untuk Pemula*. Jakarta: KPU RI. 2013.
- Laporan Pertanggungjawaban DPP PKB Periode 2002-2005 pada Muktamar II PKB di Semarang 16-18 April 2005.
- Pemilu 2009 Dalam Angka, KPU RI, 2010
- Surat Keputusan Menkum HAM No M.HH-70/ AH.11.01 tahun 2008 tentang pengesahan susunan kepengurusan DPP PKB periode 2008-2013.

TENTANG PENULIS

Ahmad Helmy Fuady

Merupakan peneliti di Pusat Penelitian Sumber Daya Regional, Lembaga Ilmu Pengetahun Indonesia (P2SDR-LIPI). Penulis dapat dihubungi melalui email: elhelmy@yahoo.com

Eka Suaib

Menyelesaikan S3 di jurusan Ilmu Politik universitas Airlangga, Surabaya dengan judul disertasi "Etnisitas Kebijakan Publik (Studi Kompetisi Etnis dalam Politik Lokal Kota Kendari). Saat ini bekerja sebagai Dosen FISIP Universitas Haluoleo, Kendari. Pada tahun 2008-2013 menjabat sebagai komisioner KPU Sulawesi Tenggara. Penulis juga pernah menjabat sebagai ketua HMI cabang Kendari. Telah menghasilkan tulisan-tulisan yang dimuat di media lokal, jurnal nasional dan internasional, juga diterbitkan dalam bentuk buku. Salah satu artikel dalam jurnal internasional terbarunya berjudul "Pengaruh Vote Buying terhadap perilaku pemilih dalam Pemilu Legislatif di Kota Kendari, dan Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan". Email: ekasuaib1966@ gmail.com

Irhamna Irham

Merupakan mahasiswa di Universitas Indonesia Depok-Jawa Barat. Penulis dapat dihubungi melalui email: irhamna.irham@gmail.com

Kadek Dwita Apriani

Mahasiswa di Universitas Udayana, Denpasar-Bali. Penulis dapat di hubungi melalui email: kadek88@gmail.com.

Kurniawati Hastuti Dewi

Penulis adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Jakarta. Penelitian yang menajdi fokus kajiannya adalah gender dan politik, gender dan kebijakan desentralisasi, politik kebijakan

sosial, gender dan perubahan iklim, kajian hakhak asasi perempuan dan anak, kepemimpinan perempuan, Islam dan Demokratisasi di Indonesia dan Asia Tenggara. Gelar MA diperoleh penulis dari Faculty of Aian Studies Australian National University (ANU) tahun 2007. Gelar doctor dalam bidang Area Studies Kyoto University Jepang diperolehnya tahun 2012. Disertasi Doktoralnya memenangkan pendanaan dari International Program of Collaborative Research Center of Southeast Asian Studies Kyoto University dan Kyoto University President's Special Fund, diterbitkan menjadi buku berjudul Indonesian Woman and Local politics: Islam, Gender and Networks in Post-Soeharto Indonesia (Singapore: National University of Singapore Press and Kyoto University Press, 2015). Email: kurniawati. dewi@yahoo.com

La Husen Zuada

Penulis adalah alumni Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia. saat ini menjadi Dosen di FISIP Universitas Halu Oleo, Kendari. Penulis juga aktif menulis di harian lokal yang menyangkut isu tentang partai politik, pemilu dan desentralisasi. Sering juga diundang menjadi narasumber diskusi public di tingkat lokal Sulawesi Tenggara tentang Kepemiluan. Email: husenzuadaui@gmail.com

Moch. Nurhasim

Penulis adalah peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI. Menyelesaikan S1 jurusan Ilmu Politik di Universitas Airlangga dan s2 bidang politik di Universitas Indonesia dengan tema tesis masalah perdamaian di Aceh. Penelitia yang pernah ditekuni adalah terkait konflik di berbagai daerah, masalah pedesaan, pemilihan umum, dan masalah kemiliteran. Selain itu, penulis juga aktif sebagai Pengurus Pusat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Jakarta. Email: hasim_nur@yahoo.com

Nostalgiawan Wahyudi

Menamatkan S1 Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan S2 di Ilmu Politik (Hubungan Internasional) di International Islamic University Malaysia. Sejak tahun 2014, penulis merupakan peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI dan tergabung dalam tim penelitian Islam dan Demokrasi. Email: wan_jauzy@yahoo.com

Nyimas Latifah Letty Aziz

Penulis menamatkan SI di Fakultas Ekonomi Universitas Jambi. Saat ini menjadi salah satu peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI sejak tahun 2005, dengan fokus kajian penelitian otonomi daerah dan isu-isu ekonomi politik. Email: nyim001@lipi.co.id

R. Siti Zuhro

Penulis adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI). Gelar sarjana di bidang Hubungan Internasional diperoleh dari FISIP Universitas Jember. Mendapatkan gelar MA Ilmu Politik dari the Flinders University, Australia dan Ph.D Ilmu Politik dari Curtin University, Australia. Sebagai peneliti senior, Beliau sudah banyak menghasilkan karya tulis diantaranya Demokratisasi Lokal; Perubahan dan Kesinambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali (Yogyakarta: Ombak, 2009), Demokratisasi Lokal; Peran Aktor dalam Demokratisasi(Yogyakarta: Ombak, 2009); Kisruh Perda: Mengurai Masalah dan Solusinya (Yogyakarta: Ombak, 2010) dan lainnya. Email: wiwieqsz@yahoo.com.au

Waode Syifatu

Merupakan mahasiswa di Universitas Halu Oleo. Penulis dapat dihubungi melalui email di: waode.syifatu@gmail.com

Yusuf Maulana

Sejak tahun 2015, Penulis merupakan peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI yang tergabung dalam tim penelitian Otonomi Daerah. Gelar S1 diperolehnya dari Universitas Padjajaran, Fakulats Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Administrasi Negara. Email: yusufmaulana1987@yahoo.com

Informasi <u>Hasil Penelitian Terpilih</u>

